



**LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LKjIP)
KECAMATAN KEDUNGBANTENG
KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN 2025**



**PEMERINTAH KECAMATAN KEDUNGBANTENG
KABUPATEN BANYUMAS
2025**



Jl. Raya Kedungbanteng,
Kabupaten Banyumas



(0281) 6840444



kantorkeckcbt@gmail.com

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kami panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas Tahun 2025.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Perangkat Daerah menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) setelah anggaran berakhir.

Laporan kinerja yang disusun merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada instansi pemerintah atas penggunaan anggaran, serta bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan bahan evaluasi sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih terdapat banyak kekurangan, oleh karena itu kami mengharapkan masukan dan saran yang membangun dari semua pihak demi kesempurnaan penyusunan laporan selanjutnya. Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang telah disusun ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Kedungbanteng, 30 Januari 2026

CAMAT KEDUNGBANTENG



PURWANTORO, S.H.

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19680102 199606 1 001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Kedungbanteng Tahun 2025 menyajikan pengukuran hasil kinerja pencapaian sasaran yang diarahkan untuk dapat mencapai Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Banyumas sesuai target kinerja yang telah menjadi komitmen Pemerintah Kabupaten Banyumas.

Hasil pengukuran kinerja pada masing-masing tujuan/sasaran dan indikator tujuan telah dianalisis, yaitu dengan membandingkan realisasi kinerja berdasar target kinerja dan membandingkan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun lalu. Laporan ini menyajikan pula uraian program beserta anggarannya, realisasi anggaran yang mendukung realisasi tujuan dan sasaran yang diambil Kecamatan Kedungbanteng dalam mencapai tujuan/sasaran atau indikator kinerja.

Berdasarkan hasil pengukuran, penyelenggaraan pemerintah di Kecamatan Kedungbanteng pada tahun 2025 dapat dikatakan Sangat Tinggi (lebih dari 91 %). Hal ini didasarkan pada hasil pengukuran kinerja yang dapat dicapai melalui pelaksanaan berbagai kebijakan, program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja (PK) Kecamatan Kedungbanteng tahun 2025. Secara rinci dapat dijelaskan, dari hasil pengukuran kinerja terhadap 11 (sebelas) Indikator Kinerja Utama Kecamatan Kedungbanteng dapat disimpulkan bahwa semua indikator (11 indikator) tercapai dengan kategori " Sangat Tinggi ".

Berdasarkan analisis tingkat capaian sasaran dibandingkan dengan penyerapan anggaran, dari 11 (sebelas) Indikator Kinerja Utama (IKU) menunjukkan bahwa ada 7 (tujuh) indikator yang tercapai dengan efisien karena indikator-indikator kinerja tersebut dapat dicapai sebesar 100 % atau lebih dan persentase penyerapan anggarannya kurang dari 100 %.

Akhirnya semoga LKjIP ini dapat menjadi bahan evaluasi dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Kedungbanteng. Prestasi kinerja yang berhasil diraih merupakan hasil kerja keras seluruh elemen di Kecamatan Kedungbanteng bersama dengan stakeholder yang dibingkai semangat kebersamaan dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Berbagai kekurangan yang ada, tentunya menjadi pemacu untuk memotivasi agar lebih bersemangat dalam bekerja dan berusaha demi menjadikan Banyumas yang Maju, Adil, Makmur dan Mandiri.

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Kata Pengantar	ii
Ikhtisar Eksekutif	iii
Daftar Isi	iv
Daftar Tabel.....	v
Daftar Gambar.....	vi
Daftar Lampiran	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Kewenangan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan.....	1
C. Gambaran Umum Kecamatan Kedungbanteng.....	4
D. Susunan Organisasi.....	6
E. Sumber Daya Aparatur	7
F. Isu Strategis	7
G. Sistematika Penulisan	8
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
A. Rencana Strategis	10
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2025	11
C. Rencana Anggaran Tahun 2025	13
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Capaian Kinerja Organisasi	14
B. Analisis Capaian Kinerja	16
C. Realisasi Anggaran	58
D. Efektifitas Penggunaan Anggaran	58
E. Analisis Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya terhadap Capaian Kinerja	60
F. Perbandingan Anggaran dan Realisasi Pengadaan Barang dan Jasa.....	61
G. Prestasi dan Penghargaan.....	61
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan Umum Capaian Kinerja	63
B. Progres Penyelesaian Isu-isu Strategis	64

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	:	ASN berdasarkan Golongan Tahun 2025
Tabel 1.2	:	ASN berdasarkan Jenjang Pendidikan Tahun 2025
Tabel 2.1	:	Indikator Kinerja Utama Kecamatan Kedungbanteng Tahun 2025
Tabel 2.2	:	Perjanjian Kinerja Kecamatan Kedungbanteng Tahun 2025
Tabel 2.3	:	Rencana Anggaran Per Program Tahun 2025
Tabel 3.1	:	Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2025
Tabel 3.2	:	Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tujuan Tahun 2025
Tabel 3.3	:	Perbandingan Capaian Kinerja Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan 2023 sd 2025
Tabel 3.4	:	Perbandingan Capaian Kinerja Tujuan Tahun 2025 dengan Target Akhir Renstra
Tabel 3.5	:	Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tujuan Tahun 2025 dengan standar nasional, provinsi dan kabupaten sekitar
Tabel 3.6	:	Tabel Efisiensi Anggaran Target Kinerja Tujuan dan Sasaran tahun 2025
Tabel 3.7	:	Tabel Analisis Program Indikator Kinerja Tujuan : Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas
Tabel 3.8	:	Perbandingan antara Target dengan Realisasi Kinerja Sasaran 1 tahun 2025
Tabel 3.9	:	Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemerintah Kecamatan Tahun 2023 s/d 2025
Tabel 3.10	:	Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2025 dengan Target Akhir Renstra
Tabel 3.11	:	Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran tahun 2025 dengan standar nasional, provinsi dan kabupaten sekitar
Tabel 3.12	:	Tabel Efisiensi Anggaran Program dan Kegiatan yang mendukung capaian sasaran 1 tahun 2025
Tabel 3.13	:	Analisis Program yang mendukung Capaian Indikator Kinerja Sasaran : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemerintah Kecamatan
Tabel 3.14	:	Perbandingan antara Target Kinerja dengan Realisasi Kinerja sasaran 2 tahun 2025
Tabel 3.15	:	Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Kecamatan tahun 2023 s/d 2025

Tabel 3.16	:	Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintahan Kecamatan Tahun 2025 dengan target Akhir Renstra
Tabel 3.17	:	Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 2 tahun 2025 dengan Standar Nasional, Provinsi dan Kabupaten sekitar
Tabel 3.18	:	Tabel Efisiensi Anggaran Program dan Kegiatan tahun 2025
Tabel 3.19	:	Analisis Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Tabel 3.20	:	Perbandingan antara Target Kinerja dengan Realisasi Kinerja Indikator Program 1 : Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik tahun 2025
Tabel 3.21	:	Perbandingan Capaian Kinerja Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik tahun 2023 s/d 2025
Tabel 3.22	:	Perbandingan Capaian Kinerja Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik tahun 2025 dengan target akhir Renstra 2024-2026
Tabel 3.23	:	Perbandingan Realisasi Nilai IKM Tahun 2025 dengan standar nasional, provinsi dan kabupaten sekitar
Tabel 3.24	:	Tabel Efisiensi Anggaran Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik tahun 2025
Tabel 3.25	:	Analisis Kinerja Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik tahun 2025
Tabel 3.26	:	Perbandingan antara Target Kinerja dengan Realisasi Kinerja Indikator Program 3 : Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Tahun 2025
Tabel 3.27	:	Perbandingan Capaian Kinerja Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan tahun 2023 s.d 2025
Tabel 3.28	:	Perbandingan Capaian Kinerja Program Pemberdayaan Masyarakat Desa tahun 2025 dengan target Akhir Renstra 2024-2026
Tabel 3.29	:	Perbandingan realisasi Kinerja Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan tahun 2025 dengan standar Nasional, Provinsi dan kabupaten sekitar
Tabel 3.30	:	Tabel Efisiensi Anggaran Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan tahun 2025

Tabel 3.31	:	Analisis Kinerja kegiatan dalam rangka mencapai indikator kinerja Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan tahun 2025
Tabel 3.32	:	Perbandingan antara Target Kinerja dengan Realisasi Kinerja Indikator Program 4 : Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum tahun 2025
Tabel 3.33	:	Perbandingan Capaian Kinerja Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum tahun 2025 dengan tahun 2023 dan 2025
Tabel 3.34	:	Perbandingan Capaian Kinerja Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum tahun 2025 dengan target akhir Renstra 2024-2026
Tabel 3.35	:	Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum tahun 2025 dengan Standar Nasional, Provinsi dan Kabupaten sekitar
Tabel 3.36	:	Tabel Efisiensi Anggaran Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum tahun 2025
Tabel 3.37	:	Analisis Realisasi Kinerja Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum tahun 2025
Tabel 3.38	:	Perbandingan Target/Realisasi/Capaian Kinerja Program 5 : Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
Tabel 3.39	:	Perbandingan Capaian Kinerja Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum tahun 2025 dengan tahun 2023 dan 2024
Tabel 3.40	:	Perbandingan Capaian Kinerja Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum tahun 2025 dengan target akhir Renstra 2024-2026
Tabel 3.41	:	Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum tahun 2025 dengan Standar Nasional, Provinsi dan Kabupaten sekitar
Tabel 3.42	:	Tabel Efisiensi Anggaran Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum tahun 2025
Tabel 3.43	:	Analisis Realisasi Kinerja Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum tahun 2025
Tabel 3.44	:	Perbandingan Target/Realisasi/Capaian Kinerja Program 5 : Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
Tabel 3.45	:	Perbandingan Capaian Kinerja Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa tahun 2025 dengan tahun 2023 dan 2024
Tabel 3.46	:	Perbandingan Capaian Kinerja Program 6 tahun 2025 dengan target akhir Renstra 2022-2026

Tabel 3.47	:	Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum tahun 2025 dengan Standar Nasional, Provinsi dan Kabupaten sekitar
Tabel 3.48	:	Tabel Efisiensi Anggaran Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa tahun 2025
Tabel 3.49	:	Analisis Realisasi Kinerja Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa tahun 2025
Tabel 3.50	:	Anggaran dan Realisasi Program Pendukung Tujuan dan Sasaran Kecamatan Kedungbanteng Tahun 2025
Tabel 3.51	:	Efektivitas Anggaran terhadap Capaian Indikator Kinerja Tahun 2025
Tabel 3.52	:	Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Kecamatan Kedungbanteng

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Kedungbanteng
Lampiran 2	Perjanjian Kinerja Kecamatan Kedungbanteng Tahun 2025

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), yang mengamanatkan Bupati untuk menyusun Laporan Kinerja Tahunan Pemerintah Daerah dan menyampaikannya kepada Gubernur, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Laporan Kinerja yang disusun secara periodik setiap akhir tahun anggaran tersebut menjadi media pertanggungjawaban dan sebagai perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan. Selain itu laporan kinerja juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya Good Governance atau dalam perspektif yang lebih luas berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan Laporan Kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi. Dengan adanya Laporan Kinerja Kecamatan Kedungbanteng, dapat diketahui tingkat capaian kinerja unit organisasi dan hal lain yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsinya, terutama gambaran mengenai tingkat kesesuaian antara program dan kegiatan yang direncanakan dengan realisasinya. Laporan ini dapat juga digunakan sebagai acuan dalam menyusun rencana kinerja dan rencana anggaran di tahun mendatang.

B. KEWENANGAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

Kecamatan Kedungbanteng memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum.

Kecamatan Kedungbanteng merupakan salah satu Kecamatan dari 27 (dua puluh tujuh) Kecamatan yang ada di Kabupaten Banyumas dan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas nomor 16 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Banyumas Nomor 68 tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas, Kecamatan Kedungbanteng mempunyai tugas membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Desa dan/atau Kelurahan serta melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah dan untuk melaksanakan tugas pembantuan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kecamatan Kedungbanteng mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat Desa dan/atau kelurahan, serta pelaksana sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah dan untuk melaksanakan tugas pembantuan;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum, meliputi :
 - 1) pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - 2) pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
 - 3) pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
 - 4) penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- 5) koordinasi pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan yang ada di wilayah Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 6) pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
 - 7) pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal.
- c. koordinator kegiatan pemberdayaan masyarakat, meliputi :
- 1) partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa dan/atau kelurahan dan kecamatan;
 - 2) sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan;
 - 3) efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan; dan
 - 4) pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan kepada Bupati.
- d. koordinator upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, meliputi:
- 1) sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan;
 - 2) harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat; dan
 - 3) pelaporan pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum kepada Bupati.
- e. koordinator penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati, meliputi :
- 1) sinergitas dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
 - 2) pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakkan peraturan perundang-undangan di wilayah kecamatan kepada bupati.

- f. koordinator pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, meliputi:
 - 1) sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait;
 - 2) pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta, dan;
 - 3) pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada Bupati.
- g. koordinator penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan, meliputi :
 - 1) sinergitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait;
 - 2) efektivitas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan, dan ;
 - 3) pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan kepada Bupati.
- h. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Desa/Kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur Desa;
- i. pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah Kabupaten yang ada di Kecamatan, meliputi;
 - 1) perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
 - 2) fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
 - 3) efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan; dan
 - 4) pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- j. penyelenggaraan pelayanan administrasi di lingkungan Kecamatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna tertib administrasi;
- k. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C. GAMBARAN UMUM KECAMATAN KEDUNGBANTENG

1. Luas Wilayah

Kecamatan Kedungbanteng merupakan salah satu kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Banyumas. Secara geografis, Kecamatan

Kedungbanteng berada di sebelah Utara wilayah Kabupaten Banyumas dan memiliki luas 6,021,94 ha atau 60,22 km² dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Kabupaten Brebes, Tegal, Pemalang dan Pekalongan
- Sebelah Timur : Kecamatan Baturaden dan Purwokerto Utara
- Sebelah Selatan : Kecamatan Karanglewas dan Purwokerto Barat
- Sebelah Barat : Kecamatan Karanglewas dan Cilongok

Dari luas wilayah tersebut yang merupakan lahan sawah sekitar 1.296,50 ha (12,96 km²) atau sekitar 21,53 % dari wilayah Kecamatan Kedungbanteng sedangkan sisanya sebesar 1.133,9 ha atau 18,83 % merupakan lahan pertanian bukan sawah dan 3.591,54 ha atau 59,63 % adalah lahan bukan pertanian.

Di Kecamatan Kedungbanteng terdapat 14 desa yaitu :

1. Desa Karangsalam Kidul
2. Desa Kebocoran
3. Desa Kedungbanteng
4. Desa Beji
5. Desa Karangnangka
6. Desa Keniten
7. Desa Dawuhan Wetan
8. Desa Dawuhan Kulon
9. Desa Baseh
10. Desa Kalisalak
11. Desa Windujaya
12. Desa Kalikesur
13. Desa Kutaliman
14. Desa Melung

2. Kondisi Demografi

Jumlah penduduk Kecamatan Kedungbanteng pada akhir tahun 2024 adalah sebesar 65.111 jiwa yang terdiri dari 32.969 laki-laki dan 32.142 perempuan. Desa dengan jumlah penduduk terbanyak adalah Desa Beji sebanyak 9.480 jiwa, sedangkan jumlah penduduk paling sedikit di Desa Melung sebanyak 2.493 jiwa (Sumber : Kecamatan Kedungbanteng dalam Angka 2025, Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyumas).

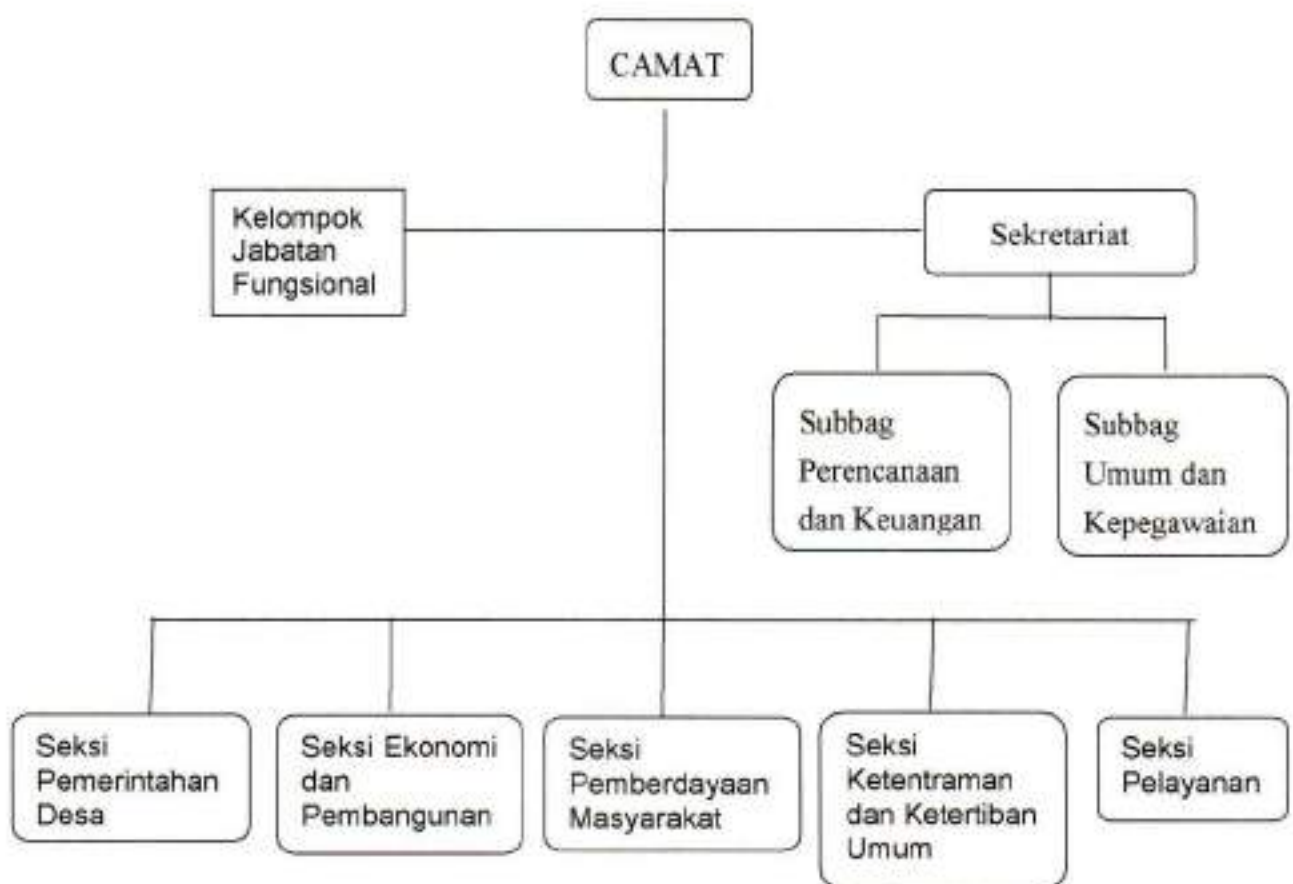
D. SUSUNAN ORGANISASI

Susunan Organisasi Kecamatan Kedungbanteng terdiri dari :

- a. Camat;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Seksi Pemerintahan Desa;
- d. Seksi Pelayanan;
- e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- f. Seksi Ekonomi Pembangunan;
- g. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- h. Kelompok jabatan fungsional;

Gambar 1.1

STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN KEDUNGBANTENG



Gambar : Struktur Organisasi Kecamatan Kedungbanteng Tahun 2025

E. SUMBER DAYA APARATUR

Dalam upaya mendukung kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat, jumlah pegawai ASN di Kecamatan Kedungbanteng per 31 Desember 2025 adalah sebanyak 13 orang dengan rincian sebagai berikut:

1. Berdasarkan Golongan

Jumlah ASN Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas pada tahun 2025 berdasarkan golongan dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1.1
ASN berdasarkan Golongan
Tahun 2025

Golongan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Proporsi (%)
A. PNS				
Golongan I	0	0	0	0 %
Golongan II	3	0	3	24 %
Golongan III	3	3	6	46 %
Golongan IV	2	0	2	15 %
B. PPPK				
PPPK	2	-	2	15 %
Jumlah	10	3	13	

Sumber : Subbag Umum dan Kepegawaian tahun 2025

2. Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Jumlah ASN Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas pada tahun 2025 berdasarkan jenjang Pendidikan dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1.2
ASN berdasarkan Jenjang Pendidikan
Tahun 2025

Jenjang Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Proporsi %
S2	1	-	1	7,69 %
S1/D4	4	3	7	53,85 %
D3	1	0	1	7,69 %
SMA	3	0	3	23,08 %
SMP	-	-		0 %
SD	1	-	1	7,69 %
Jumlah	10	3	13	

Sumber : Subbag Umum dan Kepegawaian tahun 2025

F. ISU STRATEGIS

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas daerah dan masyarakat di masa datang.

Suatu kondisi atau kejadian menjadi isu strategis jika kondisi tersebut perlu diantisipasi agar tidak menimbulkan kerugian yang besar, atau sebaliknya akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang jika tidak dimanfaatkan.

Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas telah melakukan evaluasi terhadap Renstra Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas tahun 2024-2026. Berdasarkan evaluasi dan ekspektasi berkaitan dengan tugas dan fungsi pelayanan, Kecamatan Kedungbanteng mengidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Ketersediaan SDM Kecamatan masih kurang baik dari segi kuantitas maupun kualitas dibandingkan dengan beban kerja yang menjadi kewenangan Kecamatan;
2. Belum optimalnya tata kelola penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan dan administrasi Desa;
3. Belum optimalnya kegiatan pembangunan, pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan Kedungbanteng;
4. Belum optimalnya penegakkan peraturan perundang-undangan dalam rangka peningkatan keamanan, ketertiban dan ketentraman umum.
5. Belum optimalnya sarana dan prasarana aparatur Kecamatan dalam rangka memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat

Dari gambaran kondisi daerah serta isu-isu global, nasional dan regional, serta dengan memperhatikan pemenuhan kebutuhan dasar sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM), maka diidentifikasi isu-isu strategis terkait dengan fungsi Kecamatan Kedungbanteng tahun 2024-2026 yaitu " **Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas** ".

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Halaman Judul

Kata Pengantar

Ikhtisar Eksekutif

Daftar Isi

Daftar Tabel

Daftar Gambar

Daftar Lampiran

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

B. Kewenangan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

- C. Gambaran Umum Kecamatan Kedungbanteng
- D. Susunan Organisasi
- E. Sumber Daya Aparatur
- F. Isu Strategis
- G. Sistematika Penulisan

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

- A. Rencana Strategis
- B. Perjanjian Kinerja Tahun 2025
- C. Rencana Anggaran Tahun 2025

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

- A. Capaian Kinerja Organisasi
- B. Analisis Capaian Kinerja
- C. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja
- D. Realisasi Anggaran
- E. Efektifitas Penggunaan Anggaran
- F. Analisis Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya terhadap Capaian Kinerja
- G. Perbandingan Anggaran dan Realisasi Pengadaan Barang dan Jasa
- H. Prestasi dan Penghargaan

BAB IV. PENUTUP

- A. Kesimpulan Umum Capaian Kinerja
- B. Progres Penyelesaian Isu-Isu Strategis

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kedungbanteng merupakan dokumen perencanaan Kecamatan Kedungbanteng untuk periode 5 (lima) tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Kedungbanteng berpedoman pada RPJPD Kabupaten Banyumas Tahun 2005-2025.

1. Visi

Visi merupakan arah atau kondisi ideal di masa depan yang ingin dicapai berdasarkan situasi dan kondisi saat ini. Bupati dan Wakil Bupati Banyumas telah menetapkan visi dan misi pembangunan Kabupaten Banyumas berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Banyumas Tahun 2005-2025 sebagai berikut :

“ Banyumas 2025, Sejahtera, Mandiri, Maju dan Berdaya Saing serta Lestari. ”

2. Misi

Berdasarkan pada rumusan Visi Kabupaten Banyumas, maka misi pembangunan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Banyumas adalah sebagai berikut :

1. Membangun masyarakat Kabupaten Banyumas yang Sejahtera;
2. Membangun daerah Kabupaten Banyumas yang mandiri;
3. Membangun masyarakat Kabupaten Banyumas yang Maju dan Berdaya Saing;
4. Membangun daerah Kabupaten Banyumas yang Lestari;

Dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan, maka Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas harus merumuskan visi dan misi tersebut ke dalam bentuk yang lebih nyata dan terarah. Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan atas isu strategis yang merupakan faktor kunci yang telah diidentifikasi sebelumnya sehingga pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan menjadi lebih rasional.

Kecamatan Kedungbanteng berupaya untuk menciptakan sistem integritas birokrasi yang profesional, bersih, partisipatif, inovatif dan bermanfaat melalui peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah. Komponen yang sangat penting dalam perencanaan kinerja adalah indikator kinerja.

Indikator Kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi pemerintah dalam mencapai tujuan-sasarannya sesuai dengan tugas, fungsi dan mandat (core of business) yang diembannya. Penetapan Indikator Kinerja Utama merupakan syarat penting untuk mengukur keberhasilan Pembangunan.

Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, relevan, pada suatu kurun waktu tertentu, yang menggambarkan terwujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah.

Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan oleh Kecamatan Kedungbanteng adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Indikator Kinerja Utama Kecamatan Kedungbanteng
Tahun 2025

TUJUAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI	SUMBER DATA
Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas	Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan = 50%* Capaian Sasaran Pelayanan Kecamatan + 50%*Capaian Akuntabilitas Pemerintahan Kecamatan	Laporan Hasil Pelayanan dan Laporan Hasil Evaluasi SAKIP

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian Kinerja merupakan perwujudan komitmen dan kesepakatan atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia sehingga terjadi kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Adapun Perjanjian Kinerja Kecamatan Kedungbanteng Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Kecamatan Kedungbanteng
Tahun 2025

TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1. Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas	Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	%	100
2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemerintah Kecamatan	Persentase Capaian Kinerja Pelayanan Pemerintah Kecamatan	%	100
	Indeks Pelayanan Publik Kecamatan	Angka	3,51
3. Meningkatkan Akuntabilitas Pemerintah Kecamatan	Nilai SAKIP Pemerintahan Kecamatan	Nilai	84
	Nilai SPIP	Nilai	3.153
4. Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Kecamatan terhadap Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Persentase APBDes Tepat Waktu	%	100
	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	%	100
	Persentase RKPDes Tepat Waktu	%	100
5. Meningkatnya Kualitas Pemerintahan Kecamatan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	89
6. Menurunnya Gangguan Ketentraman dan Ketertiban di Tingkat Kecamatan	Persentase penanganan Gangguan Trantibumlinmas	%	100
	Persentase penanganan pengaduan	%	100
7. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	%	100
8. Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase pelaksanaan urusan yang ditugaskan	%	100

Sumber : Perjanjian Kinerja Kecamatan Kedungbanteng tahun 2025

C. RENCANA ANGGARAN TAHUN 2025

Pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai oleh Kecamatan Kedungbanteng pada tahun 2025 dianggarkan melalui Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Jumlah Anggaran Belanja Daerah Tahun 2025 Kecamatan Kedungbanteng setelah perubahan sebesar Rp 2.456.785.704,00 dengan komposisi anggaran belanja operasional Rp 2.446.041.204,00 dan anggaran belanja modal sebesar Rp 10.744.500,00.

Adapun komposisi belanja untuk masing-masing kegiatan yang dilakukan di Kecamatan Kedungbanteng adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3
Rencana Anggaran Per Program
Tahun 2025

PROGRAM	RENCANA ANGGARAN (Rp)
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	2.393.055.704
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	4.500.000
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	20.200.000
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	6.000.000
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	19.200.000
6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	13.850.000
Jumlah	2.456.785.704

Sumber : Subbag Perencanaan dan Keuangan Kecamatan tahun 2025

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja merupakan perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur, dengan sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan, melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang disusun secara periodik.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas maka dilakukan Pengukuran Kinerja sebagai salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang seharusnya terjadi dengan kinerja yang diharapkan.

Kecamatan Kedungbanteng melaksanakan pengukuran kinerja terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Kecamatan Kedungbanteng Tahun 2025.

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan yang dituangkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK).

Hasil pengukuran atas Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Kedungbanteng Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut ini :

Tabel 3.1
Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2025

No	Tujuan/Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Keterangan
Tujuan : Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas						
1.	Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	%	100	96,73	96,73	Tidak Tercapai
Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemerintah Kecamatan						
1	Persentase Capaian Kinerja Pelayanan Pemerintah Kecamatan	%	100	97,62	97,62	Tidak Tercapai
2	Indeks Pelayanan Publik Kecamatan	Angka	3,51	2,61	74,36	Tidak Tercapai
Sasaran 2 : Meningkatkan Akuntabilitas Pemerintah Kecamatan						
1	Nilai SAKIP Pemerintahan Kecamatan	Nilai	84	80,5	95,83	Tidak Tercapai
2	Nilai SPIP	Nilai	3.153	3,526	110,19	Tercapai
Program 1 : Optimalnya kinerja pelayanan penunjang pemerintah Kecamatan						
1	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan Perangkat Daerah	%	100	100	100	Tercapai
Program 2 : Meningkatnya Kualitas Pemerintahan Kecamatan dan Pelayanan Publik						
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	89	92,25	103,65	Tercapai
Program 3 : Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan						
1	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	%	100	100	100	Tercapai
Program 4 : Menurunnya Gangguan Ketentraman dan Ketertiban di Tingkat Kecamatan						
1	Persentase penanganan Gangguan Trantibumlinmas	%	100	100	100	Tercapai
2	Persentase Penanganan Pengaduan	%	100	100	100	Tercapai
Program 5 : Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum						
1	Persentase pelaksanaan urusan yang ditugaskan	%	100	100	100	Tercapai
2	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	%	100	100	100	Tercapai
Program 6 : Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Kecamatan terhadap Penyelenggaraan Pemerintah Desa						
1	Persentase APBDes Tepat Waktu	%	100	100	100	Tercapai
2	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	%	100	100	100	Tercapai
3	Persentase RKPDes Tepat Waktu	%	100	100	100	Tercapai
Rata-rata Capaian					98,45	

Sumber : E-Monev Kecamatan Kedungbanteng tahun 2025

Berdasarkan tabel 3.1 tersebut, maka rata-rata capaian kinerja yang tercantum pada Perjanjian Kinerja Kecamatan Kedungbanteng tahun 2025 adalah sebesar 98,45 % .

B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Analisis capaian kinerja Kecamatan Kedungbanteng pada tahun 2025 dapat dijelaskan berdasarkan pencapaian masing-masing indikator kinerja yang sudah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja.

Analisis capaian dilakukan terhadap tujuan, sasaran dan masing-masing program yang ada.

1. Analisis pencapaian kinerja indikator Tujuan

Tujuan : Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas

Dalam rangka mencapai tujuan mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas, ditetapkan 1 (satu) indikator, yaitu Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan. Secara lebih rinci realisasi capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan adalah sebagai berikut :

a. Perbandingan antara Target kinerja tahun 2025 dengan Realisasi kinerja tahun 2025.

Perbandingan antara target dan realisasi indikator kinerja tujuan Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas tahun 2025 ditampilkan pada tabel 3.2 sebagai berikut :

Tabel 3.2
Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tujuan
Tahun 2025

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	%	100	96,73	96,73

Indikator kinerja Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dihitung menggunakan formulasi Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan = 50% * Capaian Sasaran Pelayanan Kecamatan + 50% * Capaian Akuntabilitas Pemerintahan Kecamatan). Data diambil dari Laporan Hasil Pelayanan dan Laporan Hasil Evaluasi SAKIP.

Berdasarkan tabel di atas, Realisasi Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas mencapai 96,73 % lebih rendah dari target yang ditetapkan yaitu 100 %, sehingga tingkat capaian kinerjanya adalah 96,73 %. Hal ini menggambarkan telah terjadi penurunan kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan Kedungbanteng.

b. Perbandingan antara realisasi dan capaian kinerja tujuan tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya.

Perbandingan antara realisasi dan capaian indikator kinerja tujuan Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas tahun 2025 dengan realisasi dan capaian indikator kinerja tujuan tahun 2023 s.d 2024 ditampilkan pada tabel 3.3 sebagai berikut :

Tabel 3.3
Perbandingan Capaian Kinerja Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan 2023 s/d 2025

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Tahun 2023				
Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	86	82,75	96,22
Tahun 2024				
Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	%	100	102,2	102,2
Tahun 2025				
Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	%	100	96,73	96,73

Sumber : e-Monev Kecamatan Kedungbanteng 2023-2025

Untuk tahun 2023 telah ditetapkan tujuan yaitu Mewujudkan kinerja pelayanan Kecamatan yang prima dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Kecamatan, yang dihitung dari Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang berasal dari Laporan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dalam Aplikasi Susanmas.

Untuk tahun 2024-2025 ditetapkan tujuan yaitu Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas dengan indikator Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang dihitung dengan memperhitungkan Capaian Sasaran Pelayanan Kecamatan dan Capaian Akuntabilitas Pemerintahan Kecamatan.

c. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2025 dengan target akhir pada Renstra

Perbandingan antara realisasi indikator kinerja tujuan Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas tahun 2025 dengan target akhir pada Renstra ditampilkan pada tabel 3.4 sebagai berikut:

Tabel 3.4
Perbandingan Capaian Kinerja Tujuan tahun 2025
dengan Target Akhir Renstra

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2025			Target 2026 akhir Renstra	Persentase Kinerja Renstra s.d th 2025
		Target	Realisasi	%		
1	2	3	4	5	6	7
Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	%	100	96,73	96,73	100	96,73 %

Sumber : e-Monev Kecamatan Kedungbanteng tahun 2025

Dari tabel perbandingan capaian kinerja tujuan tahun 2025 dengan capaian kinerja tujuan akhir Renstra tahun 2024-2026 dapat dilihat bahwa Persentase capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan adalah 96,73 % dari target akhir Renstra yaitu sebesar 100 %.

d. Perbandingan realisasi capaian kinerja tahun 2025 dengan standar nasional , provinsi dan kabupaten sekitar (barlingmascakeb).

Perbandingan realisasi capaian kinerja tujuan tahun 2025 dengan standar nasional, provinsi Jawa Tengah dan kabupaten sekitar (Banjarnegara, Purbalingga, Cilacap dan Kebumen) dapat dilihat pada tabel 3.5 sebagai berikut :

Tabel 3.5
Perbandingan realisasi capaian kinerja tujuan tahun 2025
dengan standar nasional, provinsi dan kabupaten sekitar

Indikator Kinerja	Realisasi	Standar Nasional	Provinsi Jateng	Kab. Purbalingga	Kab. Banjar negara	Kab. Cilacap	Kab. Kebumen
1	2	3	4	5	6	7	8
Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	96,73	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Sumber : e-Monev Kabupaten Banyumas, 2025

e. Analisis penyebab kegagalan pencapaian target kinerja.

Penyebab kegagalan dalam pencapaian target tujuan adalah :

- 1) Kurangnya SDM di bagian Pelayanan baik secara kuantitatif maupun kualitatif sehingga pelayanan terhadap masyarakat menjadi kurang optimal
- 2) Kurangnya sarana dan prasarana pelayanan dan penyelenggaraan pemerintahan
- 3) Kurangnya pemahaman dan dukungan dari pemerintah Kecamatan dalam implementasi pencapaian tujuan dalam segala hal baik perencanaan, kegagalan penatausahaan, evaluasi dan pelaporan sehingga mengakibatkan penurunan nilai SAKIP penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan.

Solusi yang akan dilakukan dalam pencapaian target adalah :

- 1) Meningkatkan pelayanan publik kepada Masyarakat semaksimal mungkin dengan memanfaatkan sumber daya yang ada baik Sumber Daya Manusia yang terbatas jumlahnya maupun sumber daya sarana dan prasarana yang ada.
- 2) Melaksanakan koordinasi secara rutin antar seksi dan antar sub bagian baik dalam penyusunan anggaran maupun pelaksanaannya sehingga dapat disusun anggaran yang tepat sasaran sesuai kebutuhan.
- 3) Penggunaan sumber daya manusia dan teknologi yang memadai dalam pengumpulan data kinerja dan pelaporan data kinerja sehingga diperoleh data kinerja yang akurat.

f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Selama tahun 2025, Kecamatan Kedungbanteng telah melakukan berbagai upaya efisiensi antara lain :

- 1) Optimalisasi penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan sarana prasarana kantor untuk meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat dan untuk menunjang pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka mencapai target indikator tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2025.
- 2) Melakukan efisiensi anggaran dalam pelaksanaan program/kegiatan dengan tetap berorientasi pada kualitas capaian target kinerja
- 3) Melakukan refocusing atas program/kegiatan, sehingga program dan kegiatan yang dilaksanakan benar-benar yang dapat mendukung pencapaian target tujuan dan sasaran Kecamatan Kedungbanteng .

Analisis efisiensi penggunaan anggaran masing-masing program pendukung tercapainya kinerja tujuan dan sasaran dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.6
Tabel Efisiensi Anggaran Target Kinerja Tujuan dan Sasaran tahun 2025

N o	Program/ kegiatan	Anggaran Awal (perubahan 2024/induk 2025) (Rp)	Anggaran Akhir (Induk 2025/perubahan 2025)	Selisih (Rp)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.235.996.927	2.393.055.704	157.058.777
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	16.059.000	4.500.000	(11.559.000)
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	32.500.000	20.200.000	(12.300.000)
4.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	16.850.000	6.000.000	(10.850.000)
5.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	58.750.000	19.200.000	(39.550.000)
6.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	15.650.000	13.850.000	(1.800.000)
		2.375.805.927	2.456.805.704	80.999.777
			Efisiensi	0

Sumber : Aplikasi Jegos tahun 2025

g. Analisis program yang menunjang keberhasilan pencapaian perjanjian kinerja

Program yang telah dilaksanakan dalam rangka pencapaian indikator kinerja tujuan Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas, antara lain :

Tabel 3.7

Tabel Analisis Program Indikator Kinerja Tujuan :
Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas

N o	Program/Kegiatan	Indikator	Realisasi Kinerja	Realisasi keuangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah	100 %	93,58 %
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	103,65 %	63,34 %
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100 %	73,76 %
4	Program Koordinasi Ketentraman dan Keterlibatan Umum	Persentase penanganan gangguan trantibumlinmas	100 %	100 %
		Persentase penanganan pengaduan	100 %	100 %
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase pelaksanaan urusan yang ditugaskan	100 %	89,33 %
6	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase APBDes Tepat Waktu	100 %	85,14 %
		Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	100 %	100 %
		Persentase RKPDdes Tepat Waktu	100 %	100 %
Rata-rata capaian			100,41 %	89,46 %

Sumber : Aplikasi E-Monev dan Aplikasi JeGos Kecamatan
Kedungbanteng tahun 2025

Capaian rata-rata kinerja Kecamatan Kedungbanteng di tahun 2025 adalah 100,41 % sedangkan capaian rata-rata keuangan di tahun 2025 adalah 89,46 %. Capaian kinerja lebih besar daripada capaian keuangan, ini menunjukkan bahwa di Kecamatan Kedungbanteng telah terdapat efisiensi penggunaan anggaran.

Dari 6 (enam) program yang dijalankan di Kecamatan Kedungbanteng semua telah terdapat efisiensi dalam penggunaan anggarannya. Program-program yang dilaksanakan oleh Kecamatan Kedungbanteng tersebut adalah :

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Program ini bertujuan untuk meningkatkan optimalisasi kinerja pelayanan penunjang pemerintahan Kecamatan. Ada 6 (enam) kegiatan dan 18 (delapan belas) sub kegiatan dengan alokasi anggaran Rp 2.393.055.704,00 dan realisasi program sebesar Rp 2.239.406.937,00 dengan tingkat capaian realisasi keuangan sebesar 93,58 %.
- 2) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pemerintahan Kecamatan dan pelayanan publik. Ada 1 (satu) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan dengan alokasi anggaran Rp 4.500.000,00 dan realisasi program sebesar Rp 2.850.000,00 dengan capaian realisasi keuangan sebesar 63,34 %
- 3) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
Program ini bertujuan untuk meningkatkan pembinaan dan pengawasan Kecamatan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Desa. Ada 2 (dua) kegiatan dan 4 (empat) sub kegiatan dengan alokasi anggaran Rp 20.200.000,00 dan realisasi program sebesar Rp 14.900.000,00 dengan tingkat capaian realisasi keuangan sebesar 73,76 %.
- 4) Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
Program ini bertujuan untuk menurunkan gangguan ketentraman dan ketertiban di tingkat Kecamatan. Ada 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan dengan alokasi anggaran Rp 6.000.000,00 dan realisasi program sebesar Rp 6.000.000,00 dengan tingkat capaian realisasi keuangan sebesar 100 %.

5) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Program ini bertujuan untuk meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum. Ada 1 (satu) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan dengan alokasi anggaran Rp 19.200.000,00 dan realisasi program sebesar Rp 17.150.000,00 dengan capaian realisasi keuangan sebesar 89,33 %.

6) Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Program ini bertujuan untuk meningkatkan pembinaan dan pengawasan Kecamatan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Desa. Ada 1 (satu) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan dengan alokasi anggaran Rp 13.830.000,00 dan realisasi program sebesar Rp 11.775.000,00 dengan tingkat capaian realisasi keuangan sebesar 85,14 %.

2. **Analisis pencapaian kinerja indikator Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemerintah Kecamatan**

Pada tahun 2025 telah ditetapkan dua sasaran yaitu Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemerintah Kecamatan dan Meningkatkan Akuntabilitas Pemerintah Kecamatan. Dalam rangka mencapai sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemerintah Kecamatan, ditetapkan 2 (dua) indikator, yaitu Persentase Capaian Kinerja Pelayanan Pemerintah Kecamatan dan Indeks Pelayanan Publik Kecamatan.

Indikator kinerja Persentase Capaian Kinerja Pelayanan Pemerintah Kecamatan dihitung dengan formulasi = $20\% \times (\text{realisasi program pengawasan Desa} + \text{realisasi program pemerintahan dan pelayanan publik} + \text{realisasi program pemberdayaan masyarakat} + \text{realisasi program trantibum} + \text{realisasi program pemerintahan umum})$. Data diambil dari Laporan Hasil Pelayanan. Sedangkan indikator Indeks Pelayanan Publik Kecamatan diambil dari Nilai Indeks Pelayanan Publik (IPP) yang diperoleh.

a. Perbandingan antara Target kinerja tahun 2025 dengan Realisasi kinerja tahun 2025.

Perbandingan antara target dan realisasi indikator kinerja sasaran 1 yaitu Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemerintah Kecamatan tahun 2025 ditampilkan pada tabel 3.8 sebagai berikut :

Tabel 3.8
Perbandingan antara Target dengan Realisasi Kinerja Sasaran 1
Tahun 2025

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1. Persentase Capaian Kinerja Pelayanan Pemerintah Kecamatan	%	100	97,62	97,62
2. Indeks Pelayanan Publik (IPP) Kecamatan	Angka	3,51	2,61	74,36

Berdasarkan tabel di atas, Realisasi Persentase Capaian Kinerja Pelayanan Pemerintah Kecamatan lebih rendah dari targetnya namun masih mendekati target, Sedangkan realisasi Indeks Pelayanan Publik (IPP) Kecamatan masih jauh di bawah target yang sudah ditetapkan. Hal ini menggambarkan bahwa masih perlu dilakukan peningkatan kualitas pelayanan yang dilakukan khususnya di masing-masing seksi.

b. Perbandingan antara Realisasi dan capaian kinerja tahun 2025 dengan tahun 2023 dan 2024.

Perbandingan antara realisasi dan capaian indikator kinerja sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemerintah Kecamatan tahun 2025 dengan realisasi dan capaian indikator kinerja tahun 2023 dan 2024 ditampilkan pada tabel 3.9 sebagai berikut :

Tabel 3.9
Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemerintah Kecamatan tahun 2023 s/d 2025

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Tahun 2023				
Persentase Layanan Kecamatan	%	100	100	100
Indeks Pelayanan Publik (IPP) Kecamatan	-	-	-	-
Tahun 2024				
1. Persentase capaian kinerja pelayanan Pemerintah Kecamatan	%	100	99,72	99,72
2. Indeks Pelayanan Publik (IPP) Kecamatan	-	-	-	-
Tahun 2025				
1. Persentase capaian kinerja pelayanan Pemerintah Kecamatan	%	100	97,62	97,62
2. Indeks Pelayanan Publik (IPP) Kecamatan	Angka	3,51	2,61	74,36

Sumber : e-Monev Kecamatan Kedungbanteng 2023-2025

- c. Perbandingan antara Realisasi kinerja tahun 2025 dengan target akhir pada Renstra

Perbandingan antara realisasi indikator kinerja sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemerintah Kecamatan tahun 2025 dengan target akhir pada Renstra ditampilkan pada tabel 3.10 sebagai berikut :

Tabel 3.10

Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2025
dengan target Akhir Renstra

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2025			Target 2026 akhir Renstra	Persentase Kinerja Renstra s.d th 2025
		Target	Realisasi	%		
1. Persentase Capaian Kinerja Pelayanan Pemerintah Kecamatan	%	100	97,62	97,62	100	97,62
2. Indeks Pelayanan Publik (IPP) Kecamatan	Angka	3,51	2,61	74,36	3,51	74,36

- d. Perbandingan Realisasi kinerja tahun 2025 dengan standar nasional dan provinsi dan kabupaten sekitar (barlingmascakeb).

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan standar nasional, provinsi dan kabupaten sekitar ditampilkan pada tabel 3.11 sebagai berikut :

Tabel 3.11

Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran tahun 2025
dengan standar nasional, provinsi dan kabupaten sekitar

Indikator Kinerja	Realisasi	Standar Nasional	Provinsi Jateng	Kab. Purba lingga	Kab. Banjar negara	Kab. Cilacap	Kab. Kebu men
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Persentase Capaian Kinerja Pelayanan Pemerintah Kecamatan	97,62	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2. Indeks Pelayanan Publik (IPP) Kecamatan	2,61	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

e. Analisis penyebab kegagalan pencapaian target kinerja

Penyebab kegagalan dalam pencapaian target sasaran adalah :

- 1) Kurangnya SDM di bagian pelayanan baik secara kuantitatif maupun kualitatif sehingga pelayanan terhadap Masyarakat menjadi kurang optimal.
- 2) Sarana dan Prasarana pelayanan yang bukan merupakan kewenangan Kecamatan, menyebabkan keterlambatan penyelesaian pelayanan Kecamatan terhadap Masyarakat /pemohon layanan.

Solusi yang akan dilakukan dalam pencapaian target, adalah :

- 1) Menambah jumlah SDM di pelayanan dengan mengambil SDM dari seksi atau bagian lain untuk membantu petugas pelayanan, terutama pada jam-jam sibuk.
- 2) Menjalin koordinasi dengan pihak-pihak yang berwenang dalam penyediaan sarana dan prasarana yang bukan wewenang Kecamatan.

f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Selama tahun 2025, Kecamatan Kedungbanteng telah melakukan berbagai upaya efisiensi antara lain :

- 1) Optimalisasi penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan sarana prasarana kantor untuk meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat dan untuk menunjang pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka mencapai target indikator tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2025.
- 2) Melakukan efisiensi anggaran dalam pelaksanaan program/kegiatan dengan tetap berorientasi pada kualitas capaian target kinerja
- 3) Melakukan refocusing atas program/kegiatan, sehingga program dan kegiatan yang dilaksanakan benar-benar yang dapat mendukung pencapaian target tujuan dan sasaran Kecamatan Kedungbanteng .

Tabel 3.12
Tabel Efisiensi Anggaran Program dan Kegiatan
yang mendukung capaian sasaran I
tahun 2025

N o	Program/ kegiatan	Anggaran Awal (perubahan 2024/induk 2025) (Rp)	Anggaran Akhir (induk 2025/perubahan 2025)	Selisih (Rp)
1.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	16.059.000	4.500.000	(11.559.000)
2.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	32.500.000	20.200.000	(12.300.000)
3.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	16.850.000	6.000.000	(10.850.000)
4.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	58.750.000	19.200.000	(39.550.000)
5.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	15.650.000	13.850.000	(1.800.000)
		139.809.000	63.750.000	(76.059.000)
			Efisiensi	76.059.000

Sumber : Aplikasi Jegos tahun 2025

g. Analisis program yang menunjang keberhasilan pencapaian perjanjian kinerja

Program yang telah dilaksanakan dalam rangka pencapaian indikator kinerja sasaran Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pemerintah Kecamatan dapat dilihat pada tabel 3.13.

Tabel 3.13
Analisis Program yang mendukung Capaian Indikator Kinerja Sasaran :
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemerintah Kecamatan

No	Program/Kegiatan	Indikator	Realisasi Kinerja	Realisasi keuangan
1	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	103,65 %	63,34 %
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100 %	73,76 %
3	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase penanganan gangguan trantibumlinmas	100 %	100 %
4	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase pelaksanaan urusan yang ditugaskan	100 %	89,33 %
5	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase APBDes Tepat Waktu	100 %	85,14 %
Rata-rata capaian			100,73 %	82,31 %

Sumber : Aplikasi E-Monev tahun 2025 dan aplikasi Jegos 2025

Capaian rata-rata realisasi kinerja program Kecamatan Kedungbanteng di tahun 2025 adalah 100,73 % sedangkan capaian rata-rata realisasi keuangan di tahun 2025 adalah 82,31 %. Capaian kinerja lebih besar daripada capaian keuangan, ini menunjukkan bahwa di Kecamatan Kedungbanteng telah terdapat efisiensi penggunaan anggaran.

3. **Analisis pencapaian kinerja indikator Sasaran 2 : Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Kecamatan**

Pada tahun 2025 telah ditetapkan dua sasaran yaitu Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemerintah Kecamatan dan Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Kecamatan.

Untuk mencapai sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Kecamatan, ditetapkan 2(dua) indikator, yaitu Nilai SAKIP Pemerintahan Kecamatan dan Nilai Maturitas SPIP Kecamatan. Indikator kinerja Nilai SAKIP Pemerintahan Kecamatan dan Nilai Maturitas SPIP Kecamatan diperoleh dari Laporan Hasil Evaluasi (LHE) SAKIP dan LHE SPIP oleh Inspektorat.

a. Perbandingan antara Target kinerja tahun 2025 dengan Realisasi kinerja tahun 2025.

Perbandingan antara target dan realisasi indikator kinerja Nilai SAKIP Pemerintahan Kecamatan dan Nilai Maturitas SPIP Kecamatan tahun 2025 ditampilkan pada tabel 3.14 sebagai berikut :

Tabel 3.14
Perbandingan antara Target Kinerja dengan Realisasi Kinerja Sasaran 2 Tahun 2025

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
a. Nilai SAKIP Pemerintahan Kecamatan	Nilai	84	80,5	95,83
b. Nilai Maturitas SPIP Kecamatan	Nilai	3,153	3,526	110,19

Berdasarkan tabel di atas, Realisasi indikator kinerja Nilai SAKIP Pemerintahan lebih rendah dari target yang direncanakan, sedangkan realisasi indikator kinerja Nilai Maturitas SPIP Kecamatan melampaui target yang telah ditetapkan. Hal ini menggambarkan bahwa telah ada penurunan akuntabilitas pemerintahan Kecamatan Kedungbanteng terutama dalam hal pelaksanaan SAKIP dan menunjukkan adanya kesungguhan dari Kecamatan Kedungbanteng untuk meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahannya.

b. Perbandingan antara Realisasi dan capaian kinerja tahun 2025 dengan tahun 2023 dan 2024.

Perbandingan antara realisasi dan capaian indikator kinerja sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Kecamatan tahun 2025 dengan realisasi dan capaian indikator kinerja sasaran tahun 2023 s.d 2024 ditampilkan pada tabel 3.15 sebagai berikut :

Tabel 3.15
Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Kecamatan tahun 2023 s/d 2025

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Tahun 2023				
Nilai SAKIP Pemerintahan Kecamatan	Nilai	N/A	80,6	N/A
Nilai Maturitas SPIP	-	-	-	-
Tahun 2024				
Nilai SAKIP Pemerintahan Kecamatan	Nilai	79,76	83,5	104,69
Nilai Maturitas SPIP	-	-	-	-
Tahun 2025				
Nilai SAKIP Pemerintahan Kecamatan	Nilai	84	80,5	95,83
Nilai Maturitas SPIP Kecamatan	Nilai	3,153	3,526	110,19

Sumber : e-Monev Kecamatan Kedungbanteng 2023-2025

c. Perbandingan antara Realisasi kinerja tahun 2025 dengan target akhir pada Renstra

Perbandingan antara realisasi indikator kinerja sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintahan Kecamatan tahun 2025 dengan target akhir pada Renstra ditampilkan pada tabel 3.16 sebagai berikut :

Tabel 3.16
Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran
Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintahan Kecamatan Tahun 2025
dengan target Akhir Renstra

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2025			Target 2026 akhir Renstra	Persentase Kinerja Renstra s.d th 2025
		Target	Realisasi	%		
Nilai SAKIP Pemerintahan Kecamatan	Nilai	84	80,5	95,83	79,86	100,8
Nilai Maturitas SPIP Kecamatan	Nilai	3,2	3,526	110,19	3,2	110,19

d. Perbandingan Realisasi kinerja tahun 2025 dengan standar nasional dan provinsi dan kabupaten sekitar (barlingmascakeb).

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan standar nasional, provinsi dan kabupaten sekitar ditampilkan pada tabel 3.17 sebagai berikut :

Tabel 3.17
Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 2 tahun 2025
dengan standar nasional, provinsi dan kabupaten sekitar

Indikator Kinerja	Realisasi	Standar Nasional	Provinsi Jateng	Kab. Purba lingga	Kab. Banjar negara	Kab. Cilacap	Kab. Kebumen
1	2	3	4	5	6	7	8
- Nilai SAKIP Pemerintah Kecamatan	80,5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
- Nilai Maturitas SPIP Kecamatan	3,526	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Sumber : E-Monev Kecamatan Kedungbanteng tahun 2025

e. Analisis penyebab keberhasilan pencapaian target kinerja

Penyebab keberhasilan dalam pencapaian target kinerja sasaran adalah :

- 1) Sudah memiliki dokumen-dokumen perencanaan yang disusun dengan cermat dan berkualitas yang dilaporkan tepat waktu dan digunakan sebagai acuan dalam mengevaluasi kinerja yang telah dilakukan.
- 2) Dalam pengukuran kinerja sudah menggunakan data pengukuran kinerja yang akurat dan dapat diandalkan.
- 3) Pelaporan dokumen-dokumen kinerja dan evaluasi sudah akurat dan dilaporkan tepat waktu dan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan bahan perencanaan berikutnya..

Strategi yang telah dilakukan dalam rangka pencapaian target adalah :

- 1) Menyusun dokumen-dokumen perencanaan dan evaluasi dengan cermat dan akurat dan menyimpan arsipnya dengan rapi dan sistematis.
- 2) Melakukan pengukuran kinerja dengan data pengukuran kinerja yang akurat dan didukung oleh teknologi yang dapat diandalkan.

f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Selama tahun 2025, Kecamatan Kedungbanteng telah melakukan berbagai upaya efisiensi antara lain :

- 1) Optimalisasi penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan sarana prasarana kantor untuk meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat dan untuk menunjang pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka mencapai target indikator tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2025.
- 2) Melakukan efisiensi anggaran dalam pelaksanaan program/kegiatan dengan tetap berorientasi pada kualitas capaian target kinerja
- 3) Melakukan refocusing atas program/kegiatan, sehingga program dan kegiatan yang dilaksanakan benar-benar yang dapat mendukung pencapaian target tujuan dan sasaran Kecamatan Kedungbanteng .

Gambaran efisiensi anggaran untuk program dan kegiatan tahun 2025 yang mendukung tercapainya capaian kinerja sasaran 2 yaitu meningkatnya akuntabilitas pemerintahan kecamatan dapat dilihat pada tabel 3.18.

Tabel 3.18
Tabel Efisiensi Anggaran Program dan Kegiatan tahun 2025

N o	Program/ kegiatan	Anggaran Awal (perubahan 2024/induk 2025) (Rp)	Anggaran Akhir (induk 2025/perubahan 2025)	Selisih (Rp)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.375.805.927	2.456.785.704	80.979.777
		2.375.805.927	2.456.785.704	80.979.777
			Efisiensi	0

Sumber : Aplikasi Jegos tahun 2025

g. Analisis program yang menunjang keberhasilan pencapaian perjanjian kinerja

Program yang telah dilaksanakan dalam rangka pencapaian indikator kinerja sasaran Nilai SAKIP Pemerintah Kecamatan dan Nilai Maturitas SPIP Kecamatan adalah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah.

Tabel 3.19
Analisis Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

No	Program/Kegiatan	Indikator	Realisasi Kinerja	Realisasi keuangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah	100 %	93,58 %
	Rata-rata capaian		100 %	93,58 %

Sumber : Aplikasi E-Monev Kecamatan Kedungbanteng tahun 2025

Program ini bertujuan untuk mengoptimalkan kinerja pelayanan penunjang pemerintah Kecamatan dengan sasaran Nilai SAKIP Pemerintah Kecamatan dan Nilai Maturitas SPIP Kecamatan, terdiri atas 6 (enam) kegiatan dan 18 (delapan belas) sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 2.393.055,704,00 dan realisasi sebesar Rp 2.239.406.937,00 dengan tingkat capaian sebesar 93,58 %..

4. Analisis pencapaian kinerja indikator Program 1 : Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

a. Perbandingan antara Target kinerja tahun 2025 dengan Realisasi kinerja tahun 2025.

Perbandingan antara target dan realisasi indikator kinerja Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik ditampilkan pada tabel 3.20 sebagai berikut :

Tabel 3.20

Perbandingan antara Target Kinerja dengan Realisasi Kinerja Indikator Program 1 : Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Tahun 2025

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Nilai IKM	Indeks	89	92,25	103,65

Berdasarkan tabel di atas, Realisasi Indikator Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yaitu Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) lebih tinggi dari target yang ditetapkan sehingga capaian kinerjanya lebih dari 100 % .

Hal ini menggambarkan bahwa indikator nilai Indeks Kepuasan Masyarakat telah mencapai hasil optimal yang merupakan hasil penilaian survey kepuasan dari Masyarakat yang mendapat pelayanan dan mengisi aplikasi Susanmas.

b. Perbandingan antara Realisasi dan capaian kinerja tahun 2025 dengan tahun 2023 dan 2024.

Perbandingan antara realisasi dan capaian kinerja program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik tahun 2025 dengan realisasi dan capaian kinerja tahun 2023 s.d 2025 ditampilkan pada tabel 3.21 sebagai berikut :

Tabel 3.21

Perbandingan Capaian Kinerja Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik tahun 2023 s.d 2025

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Tahun 2023 Persentase pemohon Pelayanan di Kecamatan yang terlayani dengan baik	%	100	100	100
Tahun 2024 Nilai IKM	Indeks	88	86,75	98,58
Tahun 2025 Nilai IKM	Indeks	89	92,25	103,65

Sumber : e-Monev Kecamatan Kedungbanteng 2023-2025

Untuk tahun 2023 telah ditetapkan program 2 yaitu Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan indikator Persentase pemohon Pelayanan di Kecamatan yang terlayani dengan baik yang dihitung dengan formulasi jumlah pemohon yang terlayani tepat waktu dibagi jumlah pemohon yang meminta pelayanan dikalikan 100 % . Data layanan diambil dari Laporan jumlah layanan yang ada di Kecamatan Kedungbanteng.

Untuk tahun 2024 dan 2025 ditetapkan program 2 yaitu Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan formulasi Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat.

Data diambil dari Laporan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat dalam aplikasi Susanmas.

c. Perbandingan antara Realisasi kinerja tahun 2025 dengan target akhir pada Renstra

Perbandingan antara realisasi dan capaian kinerja Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik tahun 2025 dengan target akhir pada Renstra ditampilkan pada tabel 3.22 sebagai berikut :

Tabel 3.22
Perbandingan Capaian Kinerja Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik tahun 2025 dengan target Akhir Renstra 2024-2026

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2025			Target 2026 akhir Renstra	Persentase Kinerja Renstra s.d th 2025
		Target	Realisasi	%		
Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	89	92,25	103,65	90	102,5 %

Sumber : e-Monev Kecamatan Kedungbanteng tahun 2025

Dari tabel perbandingan capaian kinerja program 2 tahun 2025 dengan capaian kinerja program 2 akhir Renstra tahun 2024-2026 dapat dilihat bahwa Persentase capaian kinerja indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) tahun 2025 dibandingkan dengan target akhir Renstra 2024-2026 adalah 102,5 %.

- d. Perbandingan Realisasi kinerja tahun 2025 dengan standar nasional dan provinsi dan kabupaten sekitar (barlingmascakeb).

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan standar nasional, provinsi dan kabupaten sekitar ditampilkan pada tabel 3.23 sebagai berikut :

Tabel 3.23
Perbandingan Realisasi Nilai IKM Tahun 2025
dengan standar nasional, provinsi dan kabupaten sekitar

Indikator Kinerja	Realisasi	Standar Nasional	Provinsi Jateng	Kab. Purba lingga	Kab. Banjar negara	Kab. Cilacap	Kab. Kebumen
1	2	3	4	5	6	7	8
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	92,25	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Sumber : E-Monev Kecamatan Kedungbanteng tahun 2025

- e. Analisis penyebab keberhasilan pencapaian target kinerja.

Penyebab keberhasilan dalam pencapaian target kinerja adalah :

- 1) Efektifnya pemanfaatan SDM di bagian pelayanan walaupun baik secara kuantitatif maupun kualitatif masih kurang dari yang diharapkan.
- 2) Pemanfaatan Sarana dan Prasarana pelayanan yang sudah ada untuk meningkatkan pelayanan Kecamatan terhadap Masyarakat /pemohon layanan.

Strategi yang telah dilakukan dalam pencapaian target, adalah :

- 1) Menambah jumlah SDM di pelayanan dengan mengambil SDM dari seksi atau bagian lain untuk membantu petugas pelayanan, terutama pada jam-jam sibuk.
- 2) Menjalin koordinasi dengan pihak-pihak yang berwenang / Desa dalam pelayanan kepada masyarakat

- f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Selama tahun 2025, Kecamatan Kedungbanteng telah melakukan berbagai upaya efisiensi antara lain :

- 1) Optimalisasi penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan sarana prasarana kantor untuk meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat dan untuk menunjang pelaksanaan program/kegiatan

dalam rangka mencapai target indikator tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2025.

- 2) Melakukan efisiensi anggaran dalam pelaksanaan program/kegiatan dengan tetap berorientasi pada kualitas capaian target kinerja
- 3) Melakukan refocusing atas program/kegiatan, sehingga program dan kegiatan yang dilaksanakan benar-benar yang dapat mendukung pencapaian target tujuan dan sasaran Kecamatan Kedungbanteng

Tabel 3.24
Tabel Efisiensi Anggaran Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik tahun 2025

N o	Program/ kegiatan	Anggaran Awal (perubahan 2024 /Induk 2025) (Rp)	Anggaran Akhir (Induk 2025/perubahan 2025)	Selisih (Rp)
1.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	16.059.000	4.500.000	11.559.000
		16.059.000	4.500.000	1.755.000
			Efisiensi	11.559.000

Sumber : Aplikasi Jegos tahun 2025

g. Analisis kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian perjanjian kinerja

Kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka pencapaian indikator kinerja program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik antara lain dapat dilihat pada tabel 3.25

Tabel 3.25
Analisis Kinerja Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik tahun 2025

No	Kegiatan	Indikator	Realisasi Kinerja	Realisasi keuangan
1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	103,65 %	63,33 %
	Rata-rata capaian		103,65 %	63,33 %

Sumber : Aplikasi E-Monev dan Jegos Kecamatan Kedungbanteng tahun 2025

Pogram Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan mencakup 1 (satu) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 4.500.000,00 dan realisasi sebesar Rp 2.850.000,00 dengan tingkat capaian sebesar 63.33 %.

5. **Analisis pencapaian kinerja indikator Program 3 : Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**

a. Perbandingan antara Target kinerja tahun 2025 dengan Realisasi kinerja tahun 2025.

Perbandingan antara target dan realisasi indikator kinerja Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan ditampilkan pada tabel 3.26 sebagai berikut :

Tabel 3.26

Perbandingan antara Target Kinerja dengan Realisasi Kinerja Indikator Program 3 : Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Tahun 2025

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	%	100	100	100

Berdasarkan tabel di atas, Realisasi Indikator Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yaitu Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan sama dengan target yang ditetapkan sehingga capaian kinerjanya mencapai 100 %.

Hal ini menggambarkan bahwa indikator Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan sudah mencapai hasil optimal..

b. Perbandingan antara Realisasi dan capaian kinerja tahun 2025 dengan tahun 2023 dan 2024.

Perbandingan antara realisasi dan capaian kinerja program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan tahun 2025 dengan realisasi dan capaian indikator kinerja tahun 2023 s.d 2025 ditampilkan pada tabel 3.27 sebagai berikut :

Tabel 3.27
Perbandingan Capaian Kinerja Program Pemberdayaan
Masyarakat Desa dan Kelurahan tahun 2023 s.d 2025

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Tahun 2023 Persentase Desa yang Aktif dalam Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	%	100	90	111,11
Tahun 2024 Persentase Desa yang Aktif dalam Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	%	100	100	100
Tahun 2025 Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	%	100	100	100

Untuk tahun 2023 dan 2024 telah ditetapkan program 3 yaitu Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dengan indikator Persentase Desa yang Aktif dalam Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dihitung dengan formulasi Jumlah Desa yang Aktif dalam kegiatan pemberdayaan Masyarakat dibagi jumlah desa yang ada dikalikan 100 %. Sumber Data diambil dari Data Kasi Pemberdayaan Masyarakat.

Untuk tahun 2025 ditetapkan program 3 yaitu Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dengan indikator kinerja Jumlah capaian seluruh kegiatan pemberdayaan masyarakat dibagi jumlah kegiatan pemberdayaan yang dilakukan dikalikan 100 %

Sumber Data diambil dari Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat yang diperoleh dari Kasi Pemberdayaan Masyarakat.

c. Perbandingan antara Realisasi kinerja tahun 2025 dengan target akhir pada Renstra

Perbandingan antara realisasi indikator kinerja Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yaitu persentase pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan tahun 2025 dengan target akhir Renstra 2024-2026 ditampilkan pada tabel 3.28 sebagai berikut :

Tabel 3.28
 Perbandingan Capaian Kinerja Program Pemberdayaan Masyarakat Desa tahun 2025 dengan target Akhir Renstra 2024-2026

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2025			Target 2026 akhir Renstra	Persentase Kinerja Renstra s.d th 2025
		Target	Realisasi	%		
Persentase pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	%	100	100	100	100	100

Sumber : e-Monev Kecamatan Kedungbanteng tahun 2025

Dari tabel perbandingan capaian kinerja program 3 tahun 2025 dengan capaian kinerja program 3 akhir Renstra tahun 2024-2026 dapat dilihat bahwa capaian indikator kinerja Persentase pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan tahun 2025 dibandingkan dengan target akhir Renstra 2024-2026 adalah 100 %.

d. Perbandingan Realisasi kinerja tahun 2025 dengan standar nasional dan provinsi dan kabupaten sekitar (barlingmascakeb).

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan standar nasional, provinsi dan kabupaten sekitar ditampilkan pada tabel 3.29 sebagai berikut :

Tabel 3.29
 Perbandingan Realisasi Kinerja Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Tahun 2025 dengan standar nasional, provinsi dan kabupaten sekitar

Indikator Kinerja	Realisasi	Standar Nasional	Provinsi Jateng	Kab. Purba lingga	Kab. Banjar negara	Kab. Cilacap	Kab. Kebumen
1	2	3	4	5	6	7	8
Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Sumber : E-Monev Kecamatan Kedungbanteng tahun 2025

e. Analisis penyebab keberhasilan dalam pencapaian target kinerja.

- 1) Adanya partisipasi aktif dari Masyarakat dan perangkat Desa dan adanya koordinasi dan kerja sama yang baik dengan instansi Kecamatan dalam melaksanakan Program Pemberdayaan Masyarakat.
- 2) Program Pemberdayaan Masyarakat sudah dilaksanakan sesuai dengan kearifan lokal sehingga hasilnya lebih optimal.
- 3) Adanya kerja sama yang baik dengan pihak-pihak eksternal yang berhubungan baik langsung maupun tidak langsung dalam pelaksanaan program pemberdayaan Masyarakat.

Strategi yang telah dilakukan dalam pencapaian target, adalah :

- 1) Mengadakan kegiatan yang berhubungan langsung dengan peningkatan kapasitas baik kapasitas Lembaga-lembaga kemasyarakatan maupun kapasitas sumber daya manusianya.
- 2) Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi dalam kegiatan pemberdayaan Masyarakat baik dengan Masyarakat dan perangkat Desa maupun dengan pihak-pihak yang berkaitan langsung.

f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Selama tahun 2025, Kecamatan Kedungbanteng telah melakukan berbagai upaya efisiensi antara lain :

- 1) Optimalisasi penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan sarana prasarana kantor untuk meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat dan untuk menunjang pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka mencapai target indikator tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2025.
- 2) Melakukan efisiensi anggaran dalam pelaksanaan program/kegiatan dengan tetap berorientasi pada kualitas capaian target kinerja
- 3) Melakukan refocusing atas program/kegiatan, sehingga program dan kegiatan yang dilaksanakan benar-benar yang dapat mendukung pencapaian target tujuan dan sasaran Kecamatan Kedungbanteng

Tabel 3.30
Tabel Efisiensi Anggaran Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan tahun 2025

N o	Program/ kegiatan	Anggaran Awal (perubahan 2024/induk 2025) (Rp)	Anggaran Akhir (induk 2025/perubahan 2025)	Selisih (Rp)
1.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	32.500.000	20.200.000	12.300.000
		32.500.000	20.200.000	12.300.000
			Efisiensi	12.300.000

Sumber : Aplikasi Jegos tahun 2025

g. Analisis kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian perjanjian kinerja

Kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka pencapaian indikator kinerja program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan antara lain :

Tabel 3.31
Analisis Kinerja kegiatan dalam rangka mencapai indikator kinerja Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan tahun 2025

No	Kegiatan	Indikator	Realisasi Kinerja	Realisasi keuangan
1	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase pemberdayaan masyarakat Desa/Kelurahan	100 %	100 %
2	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Desa	100 %	99,91 %
	Rata-rata capaian		100 %	99,95 %

Sumber : Aplikasi E-Monev dan Jegos Kecamatan Kedungbanteng tahun 2025

Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan mencakup 2 (dua) kegiatan dan 4 (empat) sub kegiatan, untuk semua Sub kegiatan dalam Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan secara keseluruhan sudah tercapai target, sehingga capaian rata-rata kinerja Program adalah 100 %.

Adapun rincian kegiatan adalah sebagai berikut :

1) Kegiatan Koordinasi Pemberdayaan Desa

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan koordinasi pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan dengan sasaran program Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, terdiri atas 3 (tiga) sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 28.250.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 28.225.000,00 dengan tingkat capaian sebesar 99,91 %.

2) Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan

Kegiatan ini bertujuan untuk Meningkatkan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan dengan sasaran program Meningkatnya Pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan, terdiri atas 2 (dua) sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 4.250.000,00 dengan tingkat capaian sebesar 100 %.

6. Analisis pencapaian kinerja indikator Program 4 : Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

a. Perbandingan antara Target kinerja tahun 2025 dengan Realisasi kinerja tahun 2025.

Perbandingan antara target dan realisasi indikator kinerja Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum ditampilkan pada tabel 3.32 sebagai berikut :

Tabel 3.32

Perbandingan antara Target Kinerja dengan Realisasi Kinerja Indikator Program 4 : Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Tahun 2025

Indikator Kinerja Program	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1. Persentase penanganan gangguan trantibumlinmas	%	100	100	100
2. Persentase penanganan pengaduan	%	100	100	100

Berdasarkan tabel di atas, Realisasi Indikator Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum yaitu Persentase penanganan gangguan trantibumlinmas dan persentase penanganan pengaduan masing-masing sama dengan target yang ditetapkan sehingga capaian kinerjanya mencapai 100 %. Hal ini menggambarkan bahwa kedua indikator sudah mencapai hasil optimal .

- b. Perbandingan antara Realisasi dan capaian kinerja tahun 2025 dengan tahun 2023 dan 2024.

Perbandingan antara realisasi dan capaian kinerja indikator Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum yaitu Persentase penanganan gangguan trantibumlinmas dan persentase penanganan pengaduan pada tahun 2025 dengan realisasi dan capaian kinerja program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum pada tahun 2023 dan 2024 ditampilkan pada pada tabel 3.33 sebagai berikut :

Tabel 3.33
Perbandingan Capaian Kinerja Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum tahun 2025 dengan tahun 2023 dan 2024

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Tahun 2023				
Persentase pelaksanaan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	%	90	100	111,11
- Persentase Penanganan Pengaduan	%	N/A	N/A	N/A
Tahun 2024				
Persentase pelaksanaan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	%	100	100	100
- Persentase Penanganan Pengaduan	%	N/A	N/A	N/A
Tahun 2025				
- Persentase Penanganan Gangguan Trantibumlinmas	%	100	100	100
- Persentase Penanganan Pengaduan	%	100	100	100

Sumber : e-Monev Kecamatan Kedungbanteng 2023-2025

Untuk tahun 2023 dan 2024 telah ditetapkan program 4 yaitu Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan indikator Persentase Pelaksanaan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dihitung dengan formulasi Jumlah realisasi pelaksanaan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum dibagi jumlah rencana pelaksanaan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum dikalikan 100 %. Data diambil dari Kasi Trantibum Kecamatan Kedungbanteng.

Untuk tahun 2025 ditetapkan program 4 yaitu Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan indikator Persentase Penanganan Gangguan Trantibumlinmas dengan formulasi jumlah gangguan trantibumlinmas yang ditangani dibagi jumlah gangguan

Tabel 3.35
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Program Koordinasi Ketentraman
dan Ketertiban Umum Tahun 2025
dengan standar nasional, provinsi dan kabupaten sekitar

Indikator Kinerja	Realisasi	Standar Nasional	Provinsi Jateng	Kab. Purba lingga	Kab. Banjar negara	Kab. Cilacap	Kab. Kebu men
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Persentase penanganan gangguan trantibumlinmas	100	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2. Persentase penanganan pengaduan	100	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Sumber : E-Monev Kecamatan Kedungbanteng tahun 2025

e. Analisis penyebab keberhasilan dalam pencapaian target kinerja.

- 1) Adanya koordinasi yang baik antara Pemerintah Kecamatan dengan unsur Kepolisian, TNI, Satpol PP dan Masyarakat dalam menjaga kondisi yang aman dan tertib.
- 2) Adanya respon yang cepat dan kerja sama antar unsur-unsur yang bertanggungjawab dalam penanganan aduan dan gangguan.
- 3) Partisipasi aktif Masyarakat dalam pencegahan dan penanganan gangguan trantibumlinmas.

Strategi yang telah dilakukan dalam pencapaian target, adalah :

- 1) Meningkatkan koordinasi yang terus menerus antara pemerintah Kecamatan dengan TNI, Kepolisian dan Masyarakat dalam mencegah dan menangani gangguan trantibumlinmas.
- 2) Mengadakan Sosialisasi tentang kebencanaan dan kewaspadaan terhadap gangguan trantibumlinmas kepada tim Linmas Desa.

f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Selama tahun 2025, Kecamatan Kedungbanteng telah melakukan berbagai upaya efisiensi antara lain :

- 1) Optimalisasi penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan sarana prasarana kantor untuk meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat dan untuk menunjang pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka mencapai target indikator tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2025.

- 2) Melakukan efisiensi anggaran dalam pelaksanaan program/kegiatan dengan tetap berorientasi pada kualitas capaian target kinerja
- 3) Melakukan refocusing atas program/kegiatan, sehingga program dan kegiatan yang dilaksanakan benar-benar yang dapat mendukung pencapaian target tujuan dan sasaran Kecamatan Kedungbanteng

Tabel 3.36
Tabel Efisiensi Anggaran Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum tahun 2025

No	Program/ kegiatan	Anggaran Awal (perubahan 2024/ induk 2025) (Rp)	Anggaran Akhir (induk 2025/ perubahan 2025) (Rp)	Selisih (Rp)
1.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	16.850.000	16.850.000	0
		16.850.000	16.850.000	0
			Efisiensi	0

Sumber : Aplikasi Jegos tahun 2025

g. Analisis kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian perjanjian kinerja

Kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka pencapaian indikator kinerja program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum, antara lain :

Tabel 3.37
Analisis Realisasi Kinerja Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum tahun 2025

No	Kegiatan	Indikator	Realisasi Kinerja	Realisasi keuangan
1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	- Persentase pelaksanaan koordinasi pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum - Persentase koordinasi pencegahan gangguan yang dilakukan	100 % 100 %	99,86 % 99,86 %
	Rata-rata capaian		100 %	99,86 %

Sumber : Aplikasi E-Monev dan Jegos Kecamatan Kedungbanteng tahun 2025

Pogram Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum mencakup 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan, untuk semua Sub kegiatan dalam Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum secara keseluruhan sudah tercapai target, sehingga capaian rata-rata kinerja Program adalah 100 %.

Adapun rincian kegiatan adalah sebagai berikut :

1) Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dengan sasaran program Meningkatnya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum tingkat Kecamatan terdiri atas 1 (satu) sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 16.850.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 16.825.000,00 dengan tingkat capaian sebesar 99,86 %.

7. Analisis pencapaian kinerja indikator Program 5 : Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

a. Perbandingan antara Target kinerja tahun 2025 dengan Realisasi kinerja tahun 2025.

Perbandingan antara target dan realisasi indikator kinerja Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum ditampilkan pada tabel 3.38 sebagai berikut :

Tabel 3.38
Perbandingan Target/Realisasi/Capaian Kinerja Program 5:
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Indikator Kinerja Program	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1. Persentase pelaksanaan urusan yang ditugaskan	%	100	100	100
2. Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	%	100	100	100

Berdasarkan tabel di atas, Realisasi Indikator Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yaitu Persentase pelaksanaan urusan yang ditugaskan dan Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum masing-masing sama dengan target yang ditetapkan sehingga capaian kinerjanya mencapai 100 %.

Hal ini menggambarkan bahwa kedua indikator sudah mencapai hasil optimal .

- b. Perbandingan antara Realisasi dan capaian kinerja tahun 2025 dengan tahun 2023 dan 2024.

Perbandingan antara realisasi dan capaian kinerja Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum pada tahun 2025 dengan realisasi dan capaian kinerja pada tahun 2023 dan 2024 ditampilkan pada pada tabel 3.39 sebagai berikut :

Tabel 3.39
Perbandingan Capaian Kinerja Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum tahun 2025 dengan tahun 2023 dan 2024

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
<u>Tahun 2023</u>				
- Tidak ada program ini	-	N/A	N/A	N/A
<u>Tahun 2024</u>				
- Persentase urusan yang ditugaskan	-	100	100	100
<u>Tahun 2025</u>				
- Persentase pelaksanaan urusan yang ditugaskan	%	100	100	100
- Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	%	100	100	100

Sumber : e-Monev Kecamatan Kedungbanteng 2023-2025

Untuk tahun 2023 dan 2024 tidak ada Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum walaupun untuk sub kegiatannya yaitu Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa serta Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan masuk ke dalam Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Untuk tahun 2025 ditetapkan 2 (dua) indikator kinerja Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yaitu Persentase pelaksanaan urusan yang ditugaskan dengan formulasi $\frac{\text{Urutan penugasan yang dilaksanakan}}{\text{Urutan penugasan yang direncanakan}} \times 100\%$, dan Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dengan formulasi $\frac{\text{jumlah kegiatan fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan umum yang dilaksanakan}}{\text{jumlah kegiatan fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan umum yang direncanakan}} \times 100\%$. Data diambil dari Laporan penugasan yang dilaksanakan oleh Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum.

c. Perbandingan antara Realisasi kinerja tahun 2025 dengan target akhir pada Renstra

Perbandingan antara realisasi indikator kinerja Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum tahun 2025 dengan target akhir Renstra 2024-2026 ditampilkan pada tabel 3.40 sebagai berikut :

Tabel 3.40
Perbandingan Capaian Kinerja Program Penyelenggaraan
Urusan Pemerintahan Umum Tahun 2025
dengan target akhir Renstra 2024-2026

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2025			Target 2026 akhir Renstra	Persentase Kinerja Renstra s.d th 2025
		Target	Realisasi	%		
1. Persentase pelaksanaan urusan yang ditugaskan	%	100	100	100	100	100
2. Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	%	100	100	100	100	100

Sumber : e-Monev Kabupaten Banyumas, 2025

Dari tabel perbandingan capaian kinerja Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum tahun 2024 dengan capaian kinerja akhir Renstra tahun 2024-2026 dapat dilihat bahwa Persentase pelaksanaan urusan yang ditugaskan dan Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum tahun 2025 dibandingkan dengan target akhir Renstra 2024-2026 masing-masing mencapai 100 %.

d. Perbandingan Realisasi kinerja tahun 2025 dengan standar nasional dan provinsi dan kabupaten sekitar (barlingmascakeb).

Perbandingan realisasi kinerja Kinerja Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum tahun 2025 dengan standar nasional, provinsi dan kabupaten sekitar ditampilkan pada tabel 3.41 sebagai berikut :

Tabel 3.41
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Program Penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan Umum Tahun 2025
dengan standar nasional, provinsi dan kabupaten sekitar

Indikator Kinerja	Realisasi	Standar Nasional	Provinsi Jateng	Kab. Purba lingga	Kab. Banjar negara	Kab. Cilacap	Kab. Kebu men
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Persentase pelaksanaan urusan yang ditugaskan	100	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2. Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum.	100	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Sumber : E-Monev Kecamatan Kedungbanteng tahun 2025

e. Analisis penyebab keberhasilan dalam pencapaian target kinerja.

- 1) Adanya koordinasi dan sinkronisasi antara kebijakan pusat dan daerah (Kecamatan).
- 2) Pengelolaan anggaran yang transparan dan akuntabel.

Strategi yang telah dilakukan dalam pencapaian target, adalah :

- 1) Membangun komunikasi yang baik antar pihak-pihak terkait untuk mengurangi hambatan komunikasi antar pihak-pihak yang berkepentingan yaitu antar anggota Forkompincam dan anggota Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat.
- 2) Menerapkan teknologi dan sumber daya yang ada di Kecamatan untuk meningkatkan efisiensi pelaksanaan program.

f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Selama tahun 2025, Kecamatan Kedungbanteng telah melakukan berbagai upaya efisiensi antara lain :

- 1) Optimalisasi penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan sarana prasarana kantor untuk meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat dan untuk menunjang pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka mencapai target indikator tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2025.

- 2) Melakukan efisiensi anggaran dalam pelaksanaan program/kegiatan dengan tetap berorientasi pada kualitas capaian target kinerja
- 3) Melakukan refocusing atas program/kegiatan, sehingga program dan kegiatan yang dilaksanakan benar-benar yang dapat mendukung pencapaian target tujuan dan sasaran Kecamatan Kedungbanteng

Tabel 3.42
Tabel Efisiensi Anggaran Program Penyelenggaraan
Urusan Pemerintahan Umum tahun 2025

No	Program/ kegiatan	Anggaran Awal (perubahan 2024 /induk 2025) (Rp)	Anggaran Akhir (induk 2025/perubahan 2025)	Selisih (Rp)
1.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	58.750.000	17.150.000	(41.600.000)
		58.750.000	17.150.000	(41.600.000)
			Efisiensi	41.600.000

Sumber : Aplikasi Jegos tahun 2025

g. Analisis kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian perjanjian kinerja

Kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka pencapaian indikator kinerja program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, antara lain :

Tabel 3.43
Analisis Realisasi Kinerja Program Penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan Umum tahun 2025

No	Kegiatan	Indikator	Realisasi Kinerja	Realisasi keuangan
1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase pelaksanaan urusan yang ditugaskan Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	100 % 100 %	95,66 %
	Rata-rata capaian		100 %	95,66 %

Sumber : Aplikasi E-Monev dan Jegos Kec.Kedungbanteng tahun 2025

Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum mencakup 1 (satu) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan, untuk semua Sub kegiatan dalam Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum secara keseluruhan sudah tercapai target, sehingga capaian rata-rata kinerja Program adalah 95,66 %.

Adapun rincian kegiatan adalah sebagai berikut :

1) Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah dengan sasaran program Meningkatnya kualitas pelayanan pemerintahan Kecamatan, terdiri atas 1 (satu) kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 58.750.000,00 dengan realisasi anggaran Rp 56.200.000,00 dengan tingkat capaian sebesar 95,66 %.

8. Analisis pencapaian kinerja indikator Program 5 : Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

a. Perbandingan antara Target kinerja tahun 2025 dengan Realisasi kinerja tahun 2025.

Perbandingan antara target dan realisasi indikator kinerja Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yaitu Persentase APBDes tepat waktu dan Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada tahun 2025 ditampilkan pada tabel 3.44 sebagai berikut :

Tabel 3.44
Perbandingan Target/Realisasi/Capaian Kinerja Program 5:
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Indikator Kinerja Program	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1. Persentase APBDes tepat waktu	%	100	100	100
2. Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	%	100	100	100
3. Persentase Penyusunan RKPDes tepat waktu	%	100	100	100

Berdasarkan tabel 3.44, Realisasi Indikator Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yaitu Persentase APBDes tepat waktu ,Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Persentase Penyusunan RKPDes tepat waktu masing-masing sama dengan target yang ditetapkan sehingga capaian kinerjanya mencapai 100 %. Hal ini menggambarkan bahwa kedua indikator sudah mencapai hasil optimal .

b. Perbandingan antara Realisasi dan capaian kinerja tahun 2025 dengan tahun 2023 dan 2024.

Perbandingan antara realisasi dan capaian kinerja Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa pada tahun 2025 dengan realisasi dan capaian kinerja Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa pada tahun 2023 dan 2024 ditampilkan pada tabel 3.45 sebagai berikut :

Tabel 3.45
Perbandingan Capaian Kinerja Program
Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa tahun 2025
dengan tahun 2023 dan 2024

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
<u>Tahun 2023</u>				
- Persentase Desa yang Mendapatkan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan APBDes	%	100	100	100
- Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Desa	%	N/A	N/A	N/A
- Persentase penyusunan RKPDes tepat waktu	-	-	-	-
<u>Tahun 2024</u>				
- Persentase Desa yang Mendapatkan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan APBDes	%	100	100	100
- Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Desa	%	N/A	N/A	N/A
- Persentase penyusunan RKPDes tepat waktu	-	-	-	-
<u>Tahun 2024</u>				
- Persentase Desa yang Mendapatkan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan APBDes	%	100	100	100
- Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Desa	%	100	100	100
- Persentase penyusunan RKPDes tepat waktu	%	100	100	100

Sumber : e-Monev Kecamatan Kedungbanteng 2023-2025

Untuk tahun 2023 dan 2024 telah ditetapkan program 5 yaitu Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan indikator Persentase Desa yang Mendapatkan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan APBDes yang dihitung dengan formulasi Jumlah Desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDes dibagi jumlah Desa yang ada di wilayah Kecamatan Kedungbanteng dikalikan 100 % .

Sumber Data dari Kasi Pemerintahan Kecamatan Kedungbanteng.

Untuk tahun 2025 ditetapkan Program 6 yaitu Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan 2 (dua) indikator yaitu Persentase APBDes Tepat Waktu dengan formulasi APBDes tepat waktu dibagi Total APBDes dikalikan 100% dan Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Desa

c. Perbandingan antara Realisasi kinerja tahun 2025 dengan target akhir pada Renstra

Perbandingan antara realisasi dan capaian kinerja Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa tahun 2025 dengan target akhir Renstra 2024-2026 ditampilkan pada tabel 3.46 sebagai berikut :

Tabel 3.46
Perbandingan Capaian Kinerja Program 6 Tahun 2025
dengan target akhir Renstra 2024-2026

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2025			Target 2026 akhir Renstra	Persentase Kinerja Renstra s.d th 2025
		Target	Realisasi	%		
1. Persentase APBDes tepat waktu	%	100	100	100	100	100
2. Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	%	100	100	100	100	100
3. Persentase RKPDDes tepat waktu	%	100	100	100	100	100

Sumber : e-Monev Kabupaten Banyumas, 2025

Dari tabel perbandingan capaian kinerja program 6 tahun 2025 dengan capaian kinerja program 6 akhir Renstra tahun 2024-2026 dapat dilihat bahwa Persentase APBDes tepat waktu dan Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa tahun 2025 dibandingkan dengan target akhir Renstra 2024-2026 masing-masing mencapai 100 %.

d. Perbandingan Realisasi kinerja tahun 2025 dengan standar nasional dan provinsi dan kabupaten sekitar (barlingmascakeb)

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan standar nasional, provinsi dan kabupaten sekitar ditampilkan pada tabel 3.47 sebagai berikut :

Tabel 3.47
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Tahun 2025
dengan standar nasional, provinsi dan kabupaten sekitar

Indikator Kinerja	Realisasi	Standar Nasional	Provinsi Jateng	Kab. Purba lingga	Kab. Banjar negara	Kab. Cilacap	Kab. Kebum en
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Persentase APBDes tepat waktu	100	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2. Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	100	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
3. Persentase Penyusunan RKPDes tepat waktu	100	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Sumber : E-Monev Kecamatan Kedungbanteng tahun 2025

e. Analisis penyebab keberhasilan dalam pencapaian target kinerja

- Adanya monitoring dan evaluasi pengelolaan APBDes yang dilaksanakan secara rutin dari Kecamatan kepada pemerintah Desa.

- 2) Partisipasi Masyarakat dalam mengawasi dan memberikan masukan terhadap kebijakan Pemerintah Desa.
- 3) Komitmen Pemerintah Desa dalam menjalankan pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Strategi yang telah dilakukan dalam pencapaian target, adalah :

- 1) Membangun komunikasi yang baik antar pihak Kecamatan dengan Desa/Perangkat Desa dan Masyarakat dengan cara melaksanakan monitoring dan evaluasi ke Desa secara rutin.
- 2) Meningkatkan pengawasan terhadap kegiatan pemerintahan Desa dan meningkatkan kerja sama dengan Pendamping Desa dalam Pengawasan APBDes.

f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Selama tahun 2025, Kecamatan Kedungbanteng telah melakukan berbagai upaya efisiensi antara lain :

- 1) Optimalisasi penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan sarana prasarana kantor untuk meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat dan untuk menunjang pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka mencapai target indikator tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2024.
- 2) Melakukan efisiensi anggaran dalam pelaksanaan program/kegiatan dengan tetap berorientasi pada kualitas capaian target kinerja
- 3) Melakukan refocusing atas program/kegiatan, sehingga program dan kegiatan yang dilaksanakan benar-benar yang dapat mendukung pencapaian target tujuan dan sasaran Kecamatan Kedungbanteng

Tabel 3.48
Tabel Efisiensi Anggaran Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa tahun 2025

N o	Program/ kegiatan	Anggaran Awal (perubahan 2024/induk 2025) (Rp)	Anggaran Akhir (induk 2025/perubahan 2025)	Selisih (Rp)
1.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	32.500.000	32.475.000	(25.000)
		32.500.000	32.475.000	(25.000)
			Efisiensi	25.000

Sumber : Aplikasi Jegos tahun 2025

g. Analisis kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian perjanjian kinerja

Kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka pencapaian indikator kinerja program antara lain :

Tabel 3.49
Analisis Realisasi Kinerja Program Pembinaan dan Pengawasan
Pemerintah Desa tahun 2025

No	Kegiatan	Indikator	Realisasi Kinerja	Realisasi keuangan
1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase APBDes tepat waktu	100 %	99,94 %
		Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	100 %	
	Rata-rata capaian		100 %	99,94 %

Sumber : Aplikasi E-Monev dan Jegos Kecamatan Kedungbanteng tahun 2025

Pogram Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa mencakup 1(satu) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan, untuk semua Sub kegiatan dalam Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa secara keseluruhan sudah tercapai target, sehingga capaian rata-rata kinerja Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa adalah 100 %.

Adapun rincian kegiatan adalah sebagai berikut :

1) Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatnya pendampingan kecamatan dalam perencanaan dan pengelolaan anggaran Desa dengan sasaran program Meningkatnya pembinaan dan pengawasan Kecamatan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa, terdiri atas 2 (dua) sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 32.500.000,00 dengan realisasi anggaran Rp 32.475.000 dengan tingkat capaian sebesar 99,94 %.

C. REALISASI ANGGARAN

Ketercapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Kedungbanteng tahun 2025 didukung oleh 6 program dengan total anggaran sejumlah Rp 2.375.805.927,00 dan realisasi sebesar Rp 2.264.183.836,00 sehingga rata-rata capaian realisasi anggaran sebesar 95,12 %. Dari 6 program yang mendukung tercapainya tujuan dan sasaran Kecamatan Kedungbanteng, realisasi semua program mencapai lebih dari 90 %. Ini menunjukkan bahwa pelaksanaan dan capaian kinerja tujuan, sasaran dan program-program yang dilaksanakan di Kecamatan Kedungbanteng telah optimal.

Adapun rincian anggaran dan realisasi Program yang mendukung tujuan dan sasaran pada tahun 2025 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.50
Anggaran dan Realisasi Program Pendukung Tujuan dan Sasaran
Kecamatan Kedungbanteng Tahun 2025

No	Program	Anggaran Belanja (Rp.)	Realisasi Belanja (Rp.)	%
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.235.996.927	2.129.374.836	95,23
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik	16.059.000	15.244.000	94,92
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	32.500.000	32.475.000	99,92
4.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	16.850.000	16.825.000	99,85
5.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	58.750.000	56.200.000	95,66
6.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	15.650.000	14.065.000	89,87
	Jumlah	2.375.805.927	2.264.183.836	95,3

Sumber : JeGos Kecamatan Kedungbanteng tahun 2025

D. EFEKTIFITAS PENGGUNAAN ANGGARAN

Selama tahun 2025, pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Kecamatan Kedungbanteng dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banyumas.

Adapun jumlah anggaran dan realisasi belanja tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 3.50 di atas. Untuk mengetahui efektifitas anggaran terhadap capaian kinerja tujuan, sasaran dan program , dapat dilihat dari tabel capaian indikator kinerja dan anggaran yang direalisasikan pada tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel 3.51
Efektivitas Anggaran terhadap Capaian Indikator Kinerja Tahun 2025

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Jumlah Indikator	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Tujuan/Sasaran	Realisasi Anggaran	
				(Rp.)	%
1.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas	1	102,2	2.264.183.836	95,12
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemerintah Kecamatan	1	99,72	134.809.000	95,01
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Kecamatan	1	104,69	2.129.374.836	95,23
4.	Meningkatnya Kualitas Pemerintahan Kecamatan dan Pelayanan Publik	1	98,58	15.244.000	94,92
5.	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	1	100	32.475.000	99,92
6.	Menurunnya Gangguan Ketentraman dan Ketertiban di Tingkat Kecamatan	1	100	16.825.000	99,85
7.	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	1	100	56.200.000	95,66
8.	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Kecamatan terhadap Penyelenggaraan Pemerintah Desa	1	100	14.065.000	89,87
Jumlah		8		2.264.183.836	95,12

Sumber : Laporan E-Monev dan Jegos Kecamatan Kedungbanteng tahun 2025

Secara umum dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran pada tahun 2025 dapat dikatakan efektif terhadap pencapaian kinerja tujuan, sasaran dan program-program Kecamatan Kedungbanteng.

E. ANALISIS TINGKAT EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA TERHADAP CAPAIAN KINERJA

Bagian yang disajikan dalam tabel ini terkait dengan efisiensi anggaran untuk sasaran yang pencapaian kinerjanya mencapai atau lebih dari 100 %. Banyaknya tujuan dan sasaran yang berhasil dicapai dengan sumber daya yang efisien menunjukkan bahwa efisiensi anggaran telah mencapai tingkat yang tinggi.

Kondisi ini sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran dan prinsip pemerintahan yang baik, dimana salah satunya adalah pengelolaan sumber daya anggaran yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

Tabel 3.52
Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Jumlah Indikator	Persentase rata-rata capaian kinerja	Persentase realisasi anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6=4-5
1	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas	1	102,2	95,12	7,08
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemerintah Kecamatan	1	99,72	95,01	
3	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Kecamatan	1	104,69	95,23	9,46
4	Meningkatnya Kualitas Pemerintahan Kecamatan dan Pelayanan Publik	1	98,58	94,92	
5	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	1	100	99,92	0,08
6	Menurunnya Gangguan Ketentraman dan Ketertiban di Tingkat Kecamatan	1	100	99,85	0,15
7	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	1	100	96,66	3,34
8	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Kecamatan terhadap Penyelenggaraan Pemerintah Desa	1	100	89,87	10,13
JUMLAH		8	-	-	-

Sumber : E-monev dan JeGos Kecamatan Kedungbanteng

F. PERBANDINGAN ANGGARAN DAN REALISASI PENGADAAN BARANG DAN JASA

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa.

Untuk pengadaan barang/jasa pada tahun 2025 Kecamatan Kedungbanteng belum melaksanakan e-purchasing karena terbatasnya anggaran pengadaan dan belum memiliki pejabat pengadaan. Dari nilai total rencana pengadaan sebesar Rp 698.000.000,00 baik melalui penyedia maupun swakelola, realisasi pengadaan sebesar Rp 670.801.577,00 sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp 27.198.423,00 atau 3,89 %.

G. PRESTASI DAN PENGHARGAAN

Prestasi yang diraih oleh Kecamatan Kedungbanteng selama tahun 2025, yaitu :

1. Juara I Lomba Desa Wisata Nusantara Tahun 2025 untuk Kategori I : Desa Sangat Tertinggal/ Tertinggal/ Berkembang dari Kemendes dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia diraih oleh Desa Melung.



2. Penghargaan Desa Anti Korupsi Kabupaten Banyumas Tahun 2025 dengan nilai 92 dari Bupati Banyumas



BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN UMUM CAPAIAN KINERJA

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Kedungbanteng Tahun 2025 memuat informasi dan transparansi terkait dengan kinerja yang telah dicapai oleh organisasi sehubungan dengan anggaran yang telah digunakan. Hal ini dilakukan dengan mengidentifikasi secara jelas keluaran (output) dan hasil (outcomes) dari setiap program dan kegiatan yang telah dilaksanakan.

Laporan kinerja ini memuat pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2025 yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya serta efektifitas dan efisiensi program dan kebijakan yang telah ditetapkan. LKjIP juga menggambarkan proses yang sudah ditempuh instansi pemerintah untuk menerapkan manajemen pembangunan berbasis kinerja dan perbaikan pelayanan publik.

Dalam tahun 2025, Kecamatan Kedungbanteng menetapkan 1 (satu) tujuan, 2 (dua) sasaran dan 6 (enam) program. Tujuan yang ditetapkan adalah Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas dengan indikator Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dengan capaian 102,2 %.

Sasaran yang ditetapkan ada 2 (dua) yaitu Sasaran 1 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemerintah Kecamatan dengan indikator Persentase Capaian Kinerja Pelayanan Pemerintah Kecamatan dengan capaian kinerja 99,72 % dan Sasaran 2 Meningkatkan Akuntabilitas Pemerintah Kecamatan dengan indikator Nilai SAKIP Pemerintahan Kecamatan dengan Capaian Kinerja 104,69 %.

Pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Kecamatan Kedungbanteng dianggarkan melalui APBD tahun 2025 sebesar Rp 2.375.805.927,00 dengan realisasi sebesar Rp 2.264.183.836,00 atau serapan anggaran APBD mencapai 95,12 %.

Dari uraian dan Analisa dalam bab sebelumnya dapat dikatakan bahwa Kecamatan Kedungbanteng dalam melaksanakan tugas dan fungsinya **berhasil**, karena dari semua target dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan kategori Sangat Baik. Ini menunjukkan bahwa pengelolaan Sumber Daya

Manusia (SDM), sumber dana dan sarana di Kecamatan Kedungbanteng sudah dilaksanakan dengan efektif dan efisien untuk mendukung pencapaian kinerja Kecamatan.

B. PROGRES PENYELESAIAN ISU-ISU STRATEGIS

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) menggambarkan proses yang sudah ditempuh instansi pemerintah untuk menerapkan manajemen pembangunan berbasis kinerja dan perbaikan pelayanan publik. Setiap instansi pemerintah wajib melakukan pengukuran dan pelaporan kinerjanya, berdasarkan pada indikator yang jelas dan terukur, sehingga mudah dinilai sejauh mana program pembangunan dan pelayanan telah berjalan. Dengan berbasis kinerja yang terukur, setiap rupiah anggaran dapat dipertanggungjawabkan dan melalui indikator-indikator yang jelas, setiap kegiatan dapat diuji relevansi dan capaiannya.

Strategi yang diperlukan guna meningkatkan kinerja Kecamatan Kedungbanteng di masa mendatang antara lain : Melakukan pengendalian dan evaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan perencanaan kinerja pada tahun berikutnya, melakukan pembinaan secara rutin pada pegawai agar dalam melaksanakan tugas lebih baik lagi dan bertanggungjawab, melakukan inovasi yang efektif dan efisien untuk mencapai target yang diharapkan, melakukan perbaikan-perbaikan manajemen pengelolaan internal kantor dan melakukan koordinasi/konsultasi dengan lembaga lain baik secara horisontal maupun vertikal.

Laporan ini telah kami susun sesuai dengan pedoman yang telah ditentukan namun tentu saja masih terdapat banyak kekurangan. Untuk itu, kritik dan saran yang positif sangat kami harapkan. Semoga hasil pengukuran kinerja yang tertuang dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Kedungbanteng ini dapat bermanfaat untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang.

Kedungbanteng, 30 Januari 2026

CAMAT KEDUNGBANTENG,



PURWANTORO, S.H.

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19680102 199606 1 001



NOTA DINAS

NOMOR : 158/PDP.02.03/VII/2025

Yth : Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal RI
Dari : Direktur Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan
Hal : Penyampaian Juara Lomba Desa Tematik Festival Bangun Desa Bangun Indonesia Tahun 2025
Tanggal : 21 Juli 2025

Dalam rangka pelaksanaan Festival Bangun Desa Bangun Indonesia, Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan menyelenggarakan 4 Lomba Desa Tematik yaitu (1) Lomba Inovasi Ketahanan Pangan Desa dan Perdesaan; (2) Lomba Inovasi Pengelolaan Sampah Desa; (3) Lomba Inovasi Desa Ramah Perempuan, Peduli Anak, dan Pendidikan; dan (4) Lomba Desa Wisata Nusantara. Dengan hormat kami laporkan bahwa telah dilaksanakan tahapan-tahapan penjurian lomba meliputi:

- Launching dan Sosialisasi Lomba: 5 Mei 2025
- Pendaftaran dan Unggah Dokumen: 5 Mei – 12 Juni 2025
- Penjurian Tahap I (Penilaian Dokumen oleh Dewan Juri): 13 – 20 Juni 2025
- Penjurian Tahap II (Presentasi dan Wawancara Peserta): 23 – 30 Juni 2025

Sehubungan dengan hal tersebut, kami sampaikan Daftar Juara Pemenang Lomba Desa Tematik berdasarkan hasil penilaian Dewan Juri sebagaimana terlampir. Mohon Bapak Menteri berkenan memberikan arahan lebih lanjut.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan arahan Bapak Menteri diucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal
Pembangunan Desa dan Perdesaan,



Dr. Nugroho Setijo Nagoro, M.Si.
NIP. 19700604 199503 1 002

Tembusan:

1. Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal RI;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

**DAFTAR JUARA LOMBA DESA TEMATIK
FESTIVAL BANGUN DESA BANGUN INDONESIA**

1. JUARA LOMBA INOVASI KETAHANAN PANGAN DESA DAN PERDESAAN

Peringkat	Desa	Kecamatan	Kabupaten	Provinsi
I	Kaliwedi	Gondang	Sragen	Jawa Tengah
II	Kemiri	Jabung	Malang	Jawa Timur
III	Loa Duri Ilir	Loa Janan	Kutai Kartanegara	Kalimantan Timur

2. JUARA LOMBA INOVASI PENGELOLAAN SAMPAH DESA

Peringkat	Desa	Kecamatan	Kabupaten	Provinsi
I	Gemawang	Jambu	Semarang	Jawa Tengah
II	Kertayasa	Sindang Agung	Kuningan	Jawa Barat
III	Gulingan	Mengwi	Badung	Bali

3. JUARA LOMBA INOVASI DESA RAMAH PEREMPUAN, PEDULI ANAK, DAN PENDIDIKAN

Peringkat	Desa	Kecamatan	Kabupaten	Provinsi
I	Bantan Timur	Bantan	Bengkalis	Riau
II	Geneng	Jepon	Blora	Jawa Tengah
III	Putat	Patuk	Gunung Kidul	D.I Yogyakarta

4. JUARA LOMBA DESA WISATA NUSANTARA

Peringkat	Desa	Kecamatan	Kabupaten	Provinsi
Kategori I: Desa Sangat Tertinggal/Tertinggal/Berkembang				
I	Melung	Kedungbanteng	Banyumas	Jawa Tengah
II	Muara Cuban	Batang Asai	Sarolangun	Jambi
III	Golo Loni	Rana Mese	Manggarai Timur	Nusa Tenggara Timur
Ekonomi Kreatif	Hutabulu	Siborongborong	Tapanuli Utara	Sumatera Utara
Ramah Lingkungan	Talaga	Ibu Selatan	Halmahera Barat	Maluku Utara
Revitalisasi Budaya	Mas	Karas	Fakfak	Papua Barat

Peringkat	Desa	Kecamatan	Kabupaten	Provinsi
Kategori II: Desa Maju/Mandiri				
I	Jagara	Darma	Kuningan	Jawa Barat
II	Mangunan	Dlingo	Bantul	D.I Yogyakarta
III	Meunasah Balee	Lhoknga	Aceh Besar	Aceh
Ekonomi Kreatif	Bandengan	Jepara	Jepara	Jawa Tengah
Ramah Lingkungan	Suak	Sidomulyo	Lampung Selatan	Lampung
Revitalisasi Budaya	Tamansari	Licin	Banyuwangi	Jawa Timur

Direktur Jenderal
Pembangunan Desa dan Perdesaan,



Dr. Nugroho Setijo Nagoro, M.Si.
NIP. 19700604 199503 1 002



KABUPATEN BANYUMAS

PIAGAM PENGHARGAAN

diberikan kepada

Desa Melung
Kecamatan Kedungbanteng

sebagai

DESA ANTI KORUPSI KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2025
DENGAN NILAI 92

Purwokerto, 16 Desember 2025

Bupati Banyumas



Dr. S. Sadevo Tri Lastiono, MM



MENTERI DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
REPUBLIK INDONESIA

PIAGAM PENGHARGAAN

Nomor: 60.28/HMS.07/I/2026

Diberikan Kepada:

DESA MELUNG KABUPATEN BANYUMAS, PROVINSI JAWA TENGAH

atas prestasinya sebagai:

JUARA 1 LOMBA DESA WISATA NUSANTARA TAHUN 2025
KATEGORI I: DESA SANGAT TERTINGGAL/TERTINGGAL/BERKEMBANG

Boyolali, 15 Januari 2026

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal
Republik Indonesia,

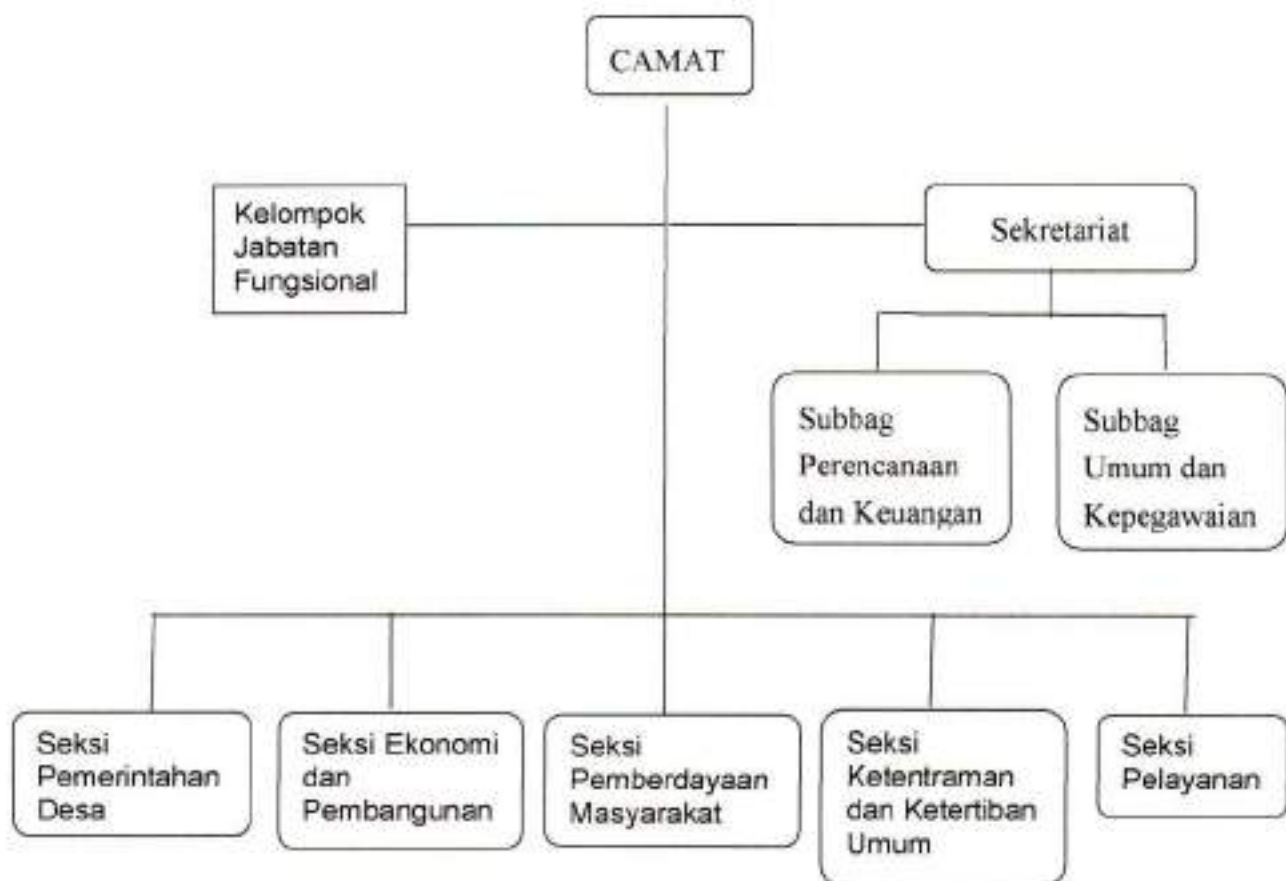


H. Yandri Susanto, S.Pt., M.Pd.



BANGUN DESA,
BANGUN INDONESIA

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN KEDUNGBANTENG





PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KECAMATAN KEDUNGBANTENG KABUPATEN BANYUMAS

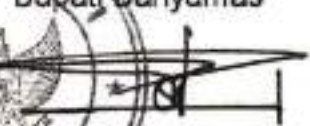
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : PURWANTORO, S.H.
Jabatan : Camat Kedungbanteng
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
Nama : Drs. H. SADEWO TRI LASTIONO, MM
Jabatan : Bupati Banyumas
Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

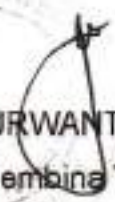
PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purwokerto, 20 Februari 2025

PIHAK KEDUA
Bupati Banyumas

SADEWO TRI LASTIONO



PIHAK PERTAMA
Camat Kedungbanteng

PURWANTORO, S.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680102 199606 1 001





PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KECAMATAN KEDUNGBANTENG KABUPATEN BANYUMAS

NO.	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR	TARGET	FORMULASI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas	Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	100%	Formulasi : Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan = 50% Capaian Sasaran Pelayanan Kecamatan+ 50% Capaian Akuntabilitas Pemerintahan Kecamatan Tipe Perhitungan = Progres Positif Sumber Data = Laporan Hasil Pelayanan dan Laporan Hasil Evaluasi SAKIP
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemerintah Kecamatan	Persentase Capaian Kinerja Pelayanan Pemerintah Kecamatan	100%	Formulasi (20% X realisasi Program Pengawasan Desa)+ (20% X realisasi Program Pemerintahan dan Pelayanan Publik) + (20% X realisasi Program Pemberdayaan Masyarakat)+(20% X realisasi Program Trantibum+)(20% X realisasi Program Pemerintahan Umum) Tipe Perhitungan = Progres Positif Sumber data : Laporan Hasil Pelayanan
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Kecamatan	Nilai SAKIP Pemerintahan Kecamatan	84	Formulasi = Hasil Evaluasi dari Inspektorat Kabupaten Banyumas Tipe Perhitungan = Progres Positif Sumber Data = Laporan Hasil Evaluasi SAKIP
4.	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Kecamatan terhadap Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Persentase APBDes Tepat Waktu	100%	Formulasi = (APBDes Tepat Waktu dibagi Total APBDes) dikali 100% Tipe Perhitungan = Progres Positif Sumber Data = Data Desa yang Penetapan APBDesnya Tepat Waktu
5.	Meningkatnya Kualitas Pemerintahan Kecamatan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	89	Formulasi = Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Tipe Perhitungan = Progres Positif Sumber Data = Laporan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat
6.	Menurunnya Gangguan Ketentraman dan Ketertiban di Tingkat Kecamatan	Persentase Penanganan Gangguan Trantibumlinmas	100%	Formulasi = (Jumlah Gangguan Trantibumlinmas yang Ditangani dibagi Jumlah Gangguan Trantibumlinmas yang Terjadi) dikali 100% Tipe Perhitungan = Progres Positif Sumber Data = Laporan Penanganan Gangguan Trantibumlinmas
7.	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100%	Formulasi = Jumlah capaian seluruh kegiatan pemberdayaan masyarakat dibagi jumlah kegiatan pemberdayaan yang dilakukan Tipe Perhitungan = Progres Positif Sumber Data = Laporan hasil pemberdayaan masyarakat Keterangan = Yang dimaksud kegiatan pemberdayaan masyarakat adalah kegiatan pada lembaga kemasyarakatan urusan Permas, pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial, dan keagamaan.



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
KECAMATAN KEDUNGBANTENG
Jalan Raya Kedungbanteng Kode Pos 53152
Telp./Faksimile (0281) 6840444

NO.	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR	TARGET	FORMULASI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase pelaksanaan urusan yang ditugaskan	100%	Formulasi = Persentase penyelesaian pekerjaan atas inisiasi pekerjaan yang ada (Urusan penugasan yang dilaksanakan dibagi urusan penugasan yang direncanakan dikali 100%) Tipe Perhitungan = Progres Positif Sumber Data = Laporan pelaksanaan urusan yang ditugaskan

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Rp 1.500.000,00	PAD
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rp 16.540.000,00	PAD
3	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Rp 6.350.000,00	PAD
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Rp 19.200.000,00	PAD
5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Rp 8.830.000,00	PAD
6	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp 2.435.196.692,00	PAD/DAU
Jumlah Anggaran		Rp 2.487.616.692,00	

Purwokerto, 20 Februari 2025

PIHAK KEDUA
Bupati Banyumas



SADE WICARI LASTIONO

PIHAK PERTAMA
Camat Kedungbanteng



PURWANTORO, SH
Pembina Tingkat I
NIP. 19580102 199608 1 001